

LAPORAN HASIL RISET 5

Aksi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
dalam Masa Pandemi

MENANGANI DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID-19 DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU



Publikasi ini disusun sebagai bagian dari proyek Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di 30 pemerintah daerah (16 Provinsi dan 14 Kota), bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan didukung secara finansial oleh Uni Eropa.

LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.



Didukung oleh pendanaan hibah dari:



Didukung oleh:



Disusun oleh:



Sekretariat UCLG ASPAC:

Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta 10110, Indonesia, Tel. (62-21) 389 01801 Fax. (62-21) 389 01802,
Email: secretariat@uclg-aspac.org, Situs: www.uclg-aspac.org | <https://localisesdgs-indonesia.org/>

Foto Sampul:

Bermain Wayang Golek di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Fotografer: Bastian AS & Tim

Tim Peneliti:

SDGs Center Universitas Lampung: Dr. Unang Mulkhan (Ketua), Dr. HS Tisnanta, Dr. Emir Chairullah, Natasya Kusumawardani, MProfStuds., Budi Kurniawan, MPP., Prasetya Nugeraha, MAB.

Penyunting Naskah:

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Rahmi Dwi Nydia, Imam Wisaya Surataruna, Aniessa Delima Sari, Rona Ikram Putri

Penerjemah:

Dimas Primacahyadi

Kontributor:

Indah Sri Wibi Nastiti, Teguh Ardhwiratno (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia – APEKSI), Aniessa Delima Sari, Hendra Susila Adi, Vidya Kartika, Cemara Dinda (UCLG ASPAC), Rona Ikram Putri

Pembahas riset:

Ir. Tubagus Ahmad Choesni, M.A., M.Phil. (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Ir. Freddy SM, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Desainer Grafis:

Derick Prawira

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	5
Executive Summary	7
I. Latar Belakang	10
II. Tujuan Penelitian	14
III. Kerangka Konsep/Teori	14
IV. Pertanyaan Penelitian	16
V. Metodologi Penelitian	16
VI. Hasil Penelitian	21
6.1. Kota Gorontalo	21
6.2. Kota Mataram	24
6.3. Provinsi DKI Jakarta	26
6.4 Provinsi Lampung	29
6.5 Analisis Data Simultan Semua Daerah (Kota Gorontalo, Kota Mataram, Provinsi Dki Jakarta dan Provinsi Lampung)	32
6.5.1 Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial	33
6.5.2 Kemitraan Multi-Pihak dan Inovasi	33
6.5.3 Program Prioritas	34
6.5.4 Building Back Better dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	35
6.5.5 Tantangan ke Depan	37
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi	40
Daftar Pustaka	45
Lampiran 1 (Daftar Kuesioner dan Wawancara)	47
Lampiran 2 (Data Statistik)	52

Belajar informal di luar ruangan saat pandemi.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Ringkasan Eksekutif

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak sosial dari pandemi COVID-19 di Indonesia; mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di tanah air dalam menghadapi dampak sosial pandemi COVID-19 dan dalam konteks era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Penelitian ini juga bertujuan menjawab beberapa pertanyaan minor yaitu 1) sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selama pandemi COVID-19; dan 2) mekanisme apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pencapaian TPB.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lintas sektor, melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian pustaka dan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dilakukan dengan 12 responden ahli dari masing-masing wilayah penelitian. Untuk pendekatan kuantitatif, survei elektronik berbasis ahli dilakukan dengan 43 responden ahli dari 11 hingga 12 kantor pemerintah di empat wilayah yang berbeda, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kota Gorontalo dan Kota Mataram.

Keempat wilayah penelitian ini termasuk dalam jaringan LOCALISE SDGs, sebuah program yang dilaksanakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan asosiasinya dalam melaksanakan TPB sekaligus membangun jaringan antara pemerintah daerah di Indonesia dan negara lainnya dengan pelaku pembangunan lainnya.

Studi ini menemukan bahwa dampak sosial COVID-19 yang paling signifikan adalah pada aspek sosial-ekonomi, yaitu adanya peningkatan angka kemiskinan serta tingginya angka pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak sosial lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan tingkat perceraian, tergolong kurang signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karena dampak sosial COVID-19 didominasi oleh aspek sosial-ekonomi, maka pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kapabilitas dan kapasitas penggunaan teknologi digital, baik bagi aparatur pemerintah (terkait layanan sosial) dan bagi masyarakat (terkait

kegiatan ekonomi mereka). Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas sektoral baik secara vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut lagi, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk membangun lebih baik dan kuat (*build back better and stronger*).

Dalam konteks TPB, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun provinsi, untuk lebih fokus dalam memastikan pelayanan publik dan jaminan sosial yang inklusif dapat diakses oleh semua yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga harus memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan masyarakat lokal, serta menyiapkan diri menghadapi bencana lainnya yang timbul karena perubahan iklim. Dengan begitu, kebijakan dan aksi ini sejalan dengan pencapaian TPB di Indonesia.

Executive Summary

The aim of this study are to determine the social impacts of the COVID-19 pandemic in Indonesia and to identify the challenges faced by local governments in handling these social impacts in the context of the Adaptation to New Habits (AKB) era.

This study also aims to answer several minor questions, including 1) the extent to which local governments can maintain the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) during the COVID-19 pandemic, and 2) the mechanisms that local governments require to increase their capacity and capability in attaining the SDGs.

This study utilises cross-sectoral research methods through both quantitative and qualitative approaches. Literature research and a qualitative approach through semi-structured interviews were conducted with 12 expert respondents from each research area. For the quantitative approach, an expert-based electronic survey was carried out with 43 expert respondents from 11 to 12 government offices in four different regions: Jakarta Special Capital Region Province, Lampung Province, Gorontalo City, and Mataram City.

These four research areas are included in the LOCALISE SDGs network, a programme implemented by the United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) in collaboration with the Association of Indonesian Municipalities (APEKSI). This programme aims to expand the capacity of local governments and their associations in implementing SDGs and build networks between local governments in Indonesia and other countries with development parties.

This study revealed that the most significant social impacts from COVID-19 have been primarily socio-economic, namely an increase in the poverty rate and the high unemployment and lay-off rates. Other social impacts, such as domestic violence, violence against children, and divorce rates, are classified as less significant.

Because the social impacts of COVID-19 are mostly socio-economic in nature, the results of this study indicate that local governments need to issue policies designed to create new jobs and increase capability and capacity in using digital technology. This applies to both government officials (related to social services) and the general public (related to their economic activities). Hence, there is a need for vertical and horizontal cross-sectoral coordination. Furthermore, a collaboration between the government, society, and the private sector is required to build back better and stronger.

In the context of SDGs, this study recommends local governments – both city and provincial – to focus more on ensuring the provision of inclusive public services and social security that those in need can access. Local governments must also empower Small-and-Medium Enterprises (SME) and local communities, and make adequate preparations for other disasters that may arise from climate change. As a result, these policies and actions will align with the attempts in attaining the SDGs in Indonesia.

Festival Krakatau yang diselenggarakan setiap tahun menampilkan adat tradisi dan pawai budaya dari berbagai kabupaten di Lampung.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Latar Belakang



Pandemi COVID-19 memperburuk permasalahan sosial yang memang sudah ada sebelumnya, seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi dan banyaknya jumlah masyarakat miskin (UN, 2020). Masalah-masalah sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, dirasakan terutama oleh negara-negara yang masih belum memiliki sistem perlindungan sosial dan layanan dasar yang kuat (UN, 2020). Oleh karena itu, pada masa pandemi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons pandemi COVID-19 dengan beberapa cara. Salah satunya dengan membuat kerangka kerja PBB tentang respons sosial-ekonomi langsung terhadap COVID-19 (*the Immediate Socio-Economic Response to COVID-19*), melalui lima pilar penting, yaitu (1) kesehatan menjadi prioritas utama, (2) melindungi orang/fokus pada manusia, (3) respons dan pemulihan ekonomi, (4) respons terhadap ekonomi makro dan kolaborasi multilateral, serta (5) kohesi sosial dan ketahanan komunitas. Lima pilar tersebut berada dalam kerangka besar 'Membangun kembali yang lebih baik' (*Building Back Better*). Dalam pelaksanaan lima pilar tersebut, PBB menekankan pada negara-negara anggotanya untuk mendorong peran pemerintah dan masyarakat lokal sebagai garda terdepan.

United Nations Development Program (UNDP) telah mengalihkan dana portofolio Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebesar US\$17.8 milyar untuk membantu menyesuaikan kebutuhan negara-negara yang terkena dampak COVID-19 (UN, 2020). UNDP menjelaskan bahwa implementasi TPB dan respons terhadap pandemi COVID-19 adalah dua hal yang saling terkait dan harus ditangani secara terintegrasi (UNDP, 2020).

Di Indonesia, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan penyesuaian, perluasan dan peningkatan sistem perlindungan sosial. Misalnya, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang berisi percepatan penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta sinergi pengambilan kebijakan operasional. Kemudian ada juga Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada perubahan di pasal 8 tentang susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan di pasal 13 yaitu tentang pendanaan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu, dalam Keppres 9/2020 ditambahkan satu pasal, yaitu Pasal 13A tentang



impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Di sektor keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 telah mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pandemi khususnya untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menciptakan konsekuensi seperti diliburkannya sekolah dan tempat kerja, dibatasinya kegiatan keagamaan, serta dibatasinya berbagai kegiatan di tempat umum. Begitupun dengan Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait COVID-19 yang disusul dengan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Kepala daerah ditetapkan menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah harus tetap menyediakan akses layanan sosial dan perlindungan sosial dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berinovasi di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Adanya peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan lima pilar kerangka respons COVID-19 dari PBB. Peraturan pemerintah juga diharapkan bisa menjaga supaya upaya pemulihan dari pandemi COVID-19 di Indonesia tetap terkonsentrasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PBB juga menyatakan bahwa krisis COVID-19 akan mengancam kohesi sosial sebuah negara karena dampaknya pada perilaku individu, keluarga dan masyarakat, termasuk di dalamnya kesejahteraan dan kesehatan mental (UN, 2020). Dalam pandemi COVID-19 ini, muncul juga risiko stigmatisasi masyarakat pada individu atau keluarga yang positif COVID-19. Di level keluarga, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan praktik bekerja dari rumah (*work from home*) dapat memicu beban kerja lebih pada ibu rumah tangga, dan mungkin berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ada juga krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan kepemimpinan politik terkait penanganan pandemi COVID-19. Dampak lainnya adalah naiknya angka kriminalitas dan gangguan sosial karena kondisi ekonomi memburuk selama pandemi. Artinya, pandemi ini dapat memicu kesenjangan sosial-ekonomi.

Hal-hal di atas adalah permasalahan yang relevan dalam beberapa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang seharusnya mendapat perhatian lebih banyak dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19.

Perlu ada penelitian yang dapat menjelaskan apa saja dampak sosial COVID-19 dan bagaimana dampak ini dapat dikelola secara berkelanjutan dalam kerangka pencapaian TPB. Artinya, penelitian empiris dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan aksi konkret untuk merespons, menyesuaikan dan mencegah krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan lainnya. Di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, kerangka membangun kembali lebih baik (*building back better*) menjadi penting untuk diterapkan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan manajerial terkait perlindungan sosial dan layanan dasar. Pemerintah juga harus memperluas sistem perlindungan sosial yang tangguh serta berpihak pada masyarakat miskin.

Anak-anak berangkat sekolah melewati rumah pengasingan
Bung Hatta di Banda Neira, Maluku.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Memetakan dampak sosial COVID-19, kebijakan, dan program pemerintah daerah.
- 2) Memetakan pola koordinasi vertikal dan horizontal pemerintah dalam merespons, menyesuaikan, dan mencegah dampak sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan/kemanusiaan sejenis. Hal ini termasuk memahami mekanisme perlindungan sosial di daerah yang selaras dengan pemerintah pusat dalam era AKB, membangun kembali untuk lebih baik dalam kerangka pencapaian TPB.
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dampak sosial dan pencapaian TPB di tengah pandemi COVID-19 dan situasi darurat lainnya.

Kerangka Konsep/Teori



Beberapa kerangka teori atau konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

(1) Kepemimpinan dalam Manajemen Krisis. Kepemimpinan yang memiliki tujuan yang kuat, rencana dan tata kelola yang jelas, serta tujuan sosial yang dapat mengambil keputusan dengan cepat dan dengan determinasi. Dalam era AKB, kepemimpinan ini diharapkan bisa mengidentifikasi, membuat dan menemukan solusi kolaboratif yang selaras dengan kerangka membangun kembali lebih baik (*Building Back Better*).

(2) Koordinasi, Kolaborasi, dan Aksi Kolektif. Misalnya, kolaborasi menjadi kunci untuk membangun kembali dengan lebih baik, karena kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan memelihara ekosistem inovasi.

(3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada empat tema utama yang diusung dalam tujuan pembangunan ini. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan yang tidak meninggalkan siapa pun (*leave no one behind*). Yang kedua, kemakmuran yang mengusung ekonomi yang berpusat pada rakyat. Ketiga, perlindungan planet bumi. Keempat, lembaga yang partisipatif, transparan dan akuntabel di semua tingkatan. PBB menekankan supaya negara-negara anggota berpartisipasi aktif dalam



menyeimbangkan keempat pilar tersebut dengan mengakui pentingnya peranan pemerintah dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengusung konsep TPB dengan mempertimbangkan pendekatan lokal di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan melalui integrasi yang menyeimbangkan empat pilar TPB yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

(4) Era Adaptasi Kebiasaan Baru dan Membangun Kembali yang lebih baik (*New Normal and Building Back Better*). Dimensi sentral dari “membangun kembali lebih baik” adalah kebutuhan akan pemulihan yang berpusat pada manusia. Pemulihan ini fokus pada kesejahteraan, meningkatkan inklusivitas, dan mengurangi ketidaksetaraan. Membangun kembali dengan lebih baik juga terkait dengan ketahanan terhadap guncangan, kecepatan untuk pulih, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya, serta adanya rencana alternatif. Semua hal ini dapat dilakukan oleh individu, institusi dan sistem.

Pertanyaan Penelitian

IV

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

- Apa dampak sosial dari pandemi COVID-19 di beberapa daerah Indonesia?
- Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial COVID-19 di masa pandemi dan AKB dengan tetap fokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?

Selain itu, beberapa pertanyaan tambahan dalam penelitian ini adalah:

- Sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dampak sosial dan pencapaian TPB di masa pandemi dan era AKB dalam kerangka membangun kembali dengan lebih baik?
- Mekanisme apa yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mewujudkan TPB, termasuk pelayanan publik dan sosial di era AKB, dalam kerangka membangun kembali dengan lebih baik?

Metodologi Penelitian

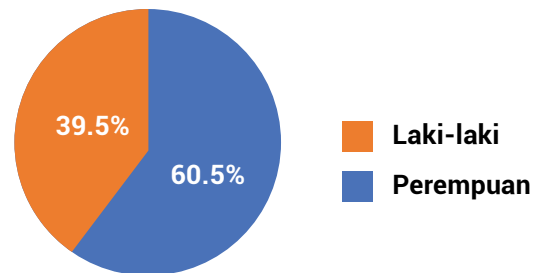
V

Penelitian lintas sektor ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ada berbagai metode yang dilakukan untuk mendapat data, yaitu melalui *desk research*, survei kuesioner elektronik, dan wawancara semi terstruktur dengan responden di empat daerah lokasi penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* pada responden ahli dan praktisi di empat pemerintah daerah di Indonesia. Empat daerah tersebut termasuk dalam jaringan LOCALISE SDGs, sebuah program yang dilaksanakan oleh UCLG ASPAC bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). LOCALISE SDGs bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan asosiasinya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di 16 provinsi dan 14 kota di Indonesia, sekaligus berjejaring dengan pemerintah daerah di dalam maupun luar negeri dan aktor pembangunan lainnya. LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta didukung oleh bantuan hibah dari Uni Eropa. Keempat daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kota Gorontalo, dan Kota Mataram.

Pemilihan level provinsi dan kota sebagai lokasi penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pembuatan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Responden untuk penelitian ini berasal dari masing-masing provinsi dan kota tersebut. Kuesioner survei diberikan pada satu perwakilan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, wawancara dilakukan di tiga dinas/lembaga di masing-masing daerah.

Presentase Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

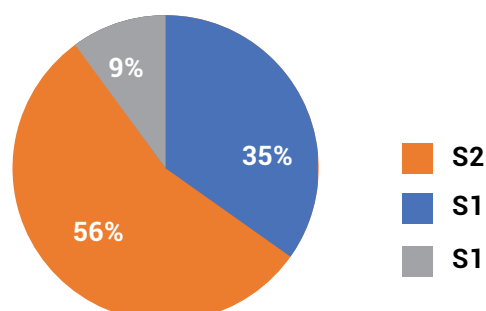


Data kuantitatif yang didapatkan dengan metode *purposive sampling* menunjukkan bahwa responden laki-laki mendominasi dengan jumlah 60,5 persen. Responden perempuan berjumlah 39,5 persen.

Nama Daerah	Frekuensi	Persentase
Provinsi DKI Jakarta	11	25,6
Kota Gorontalo	11	25,6
Provinsi Lampung	10	23,3
Kota Mataram	11	25,6
Total	43	100,0

		Frekuensi	Persentase
Valid	S1	15	34,9
	S2	24	55,8
	S3	4	9,3
	Total	43	100,0

Presentase Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 4. Sebaran Instansi Data Kuantitatif

No	Instansi	Kota/Provinsi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
2	Dinas Lingkungan Hidup	DKI Jakarta
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DKI Jakarta
4	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	DKI Jakarta
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	DKI Jakarta
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
8	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
9	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
10	Dinas Sosial	DKI Jakarta
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	DKI Jakarta
12	Bappeda	Gorontalo
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gorontalo
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gorontalo
15	Dinas Pendidikan	Gorontalo
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gorontalo
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Gorontalo
18	Sekretariat Daerah	Gorontalo
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gorontalo
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Gorontalo
21	Dinas Kesehatan	Gorontalo
22	Dinas Sosial	Gorontalo
23	Bappeda	Lampung
24	Bappeda	Lampung
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lampung
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Lampung
27	Dinas Kesehatan	Lampung
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Lampung
29	Dinas Koperasi & UKM	Lampung
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Lampung
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Lampung
32	Dinas Sosial	Lampung

33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mataram
34	Bappeda	Mataram
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Mataram
36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Mataram
37	Dinas Kesehatan	Mataram
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mataram
39	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mataram
40	Dinas Pendidikan	Mataram
41	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mataram
42	Dinas Perhubungan	Mataram
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Mataram

Data kualitatif didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan responden di tiga instansi di masing-masing daerah. Penjelasannya ada di tabel berikut:

Tabel 5. Sebaran Instansi Data Kualitatif

No	Kota/Provinsi	Instansi
1	DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) /Satuan Tugas Penanganan COVID-19
2	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • BPBD/Satuan Tugas Penanganan COVID-19
3	Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • BPBD/Satuan Tugas Penanganan COVID-19
4	Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • BPBD/Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Kampung Arab Al-Munawar yang terletak di tepi
Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Kota Mataram dan Kota Gorontalo memiliki karakteristik sama, yaitu kota jasa dan perdagangan yang menjadi ibu kota. Kedua kota tersebut juga mencatat pergerakan manusia, barang, dan jasa dengan intensitas tinggi, sehingga rentan terhadap penyebaran COVID-19. Di era AKB, tantangan Kota Gorontalo dan Kota Mataram adalah menjaga proses bisnis tetap berjalan di tengah pembatasan sosial yang terjadi karena pandemi COVID-19.

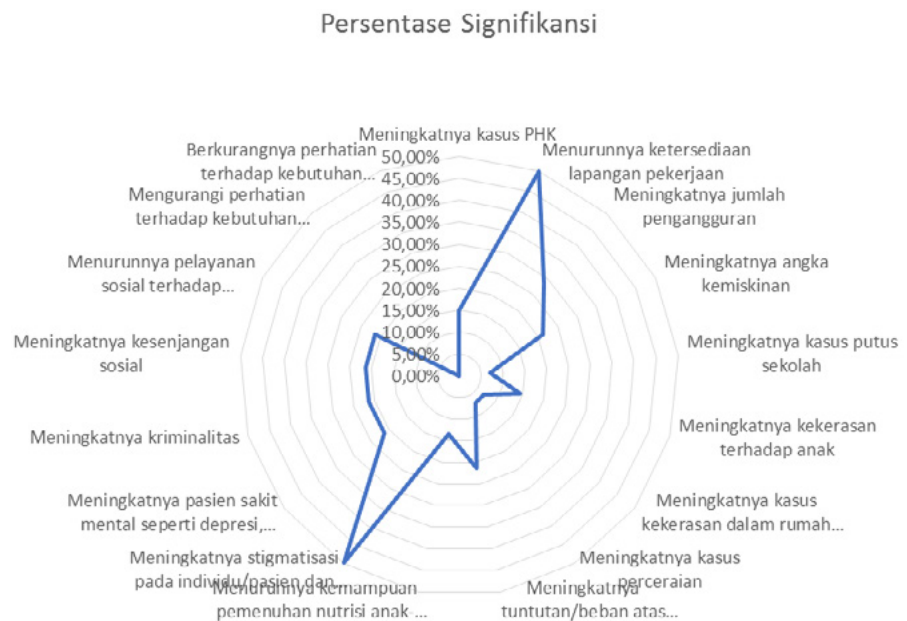
Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik berbeda, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Tingginya jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengharuskan pemerintah provinsi untuk beradaptasi dengan menciptakan model baru atau inovasi pelayanan publik.

Provinsi yang menjadi basis data berikutnya adalah Provinsi Lampung, yang merupakan pusat industri sekaligus gerbang masuk ke pulau Sumatra. Kondisi ini menyebabkan tingginya tingkat mobilitas manusia maupun barang di Provinsi Lampung, yang menjadikannya rentan terdampak COVID-19. Secara rinci, hasil penelitian berdasarkan survei dan wawancara dapat dideskripsikan dan dianalisis seperti di bawah ini:

6.1. Kota Gorontalo

Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah 79,03 km² dan terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat, Duingi, Kota Selatan, Kota Timur, Hulonthangi, Dumbo Raya, Kota Utara, Kota Tengah, dan Sipatana. Kota ini tercatat memiliki 378 ribu jiwa penduduk pada tahun 2019. Tingkat penganggurannya berada di angka 23 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskinnya adalah 68 ribu jiwa. Dalam konteks COVID-19, pada bulan Oktober 2020 Pemerintah Kota Gorontalo menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena semakin meningkatnya jumlah warga yang positif COVID-19. Dampak sosial COVID-19 di Kota Gorontalo dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

**Diagram 1. Ringkasan Dampak Sosial
COVID-19 di Kota Gorontalo**



Dari diagram di atas terlihat bahwa dampak sosial COVID-19 yang dominan terjadi dan dirasakan masyarakat di Kota Gorontalo adalah menurunnya jumlah lapangan pekerjaan, stigmatisasi pada individu dan keluarga yang positif COVID-19, serta meningkatnya jumlah pengangguran.

Tabel 6. Pemetaan peluang dan tantangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengelola dampak sosial COVID-19

Aspek	Permasalahan dan tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam manajemen dan akurasi data. Perlunya penambahan SDM khususnya dalam penanganan bencana.	Kemampuan beradaptasi dengan kebijakan penanganan pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inovasi adalah hal krusial. Salah satu contohnya adalah kegiatan <i>Patali Shopping Point</i> , yang membuat Walikota Gorontalo menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2020 dari Koran Sindo.
Kesadaran	Bagaimana menjaga kesadaran terhadap protokol COVID-19 ketika terdapat dua konsentrasi pekerjaan dalam penanganan COVID-19, yaitu (1) edukasi masyarakat dalam menciptakan kesadaran tentang menjaga kesehatan dengan 3M, dan (2) membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.	Keberadaan kampung tangguh COVID-19 Kota Gorontalo. Program ini dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang penanganan serta penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Koordinasi	Koordinasi lintas sektor dan multi level dalam sektor sosial-ekonomi, misalnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan cukup signifikan.	Kegiatan pemulihan (<i>recovery</i>) ekonomi yang berbasis padat karya memerlukan pola koordinasi lintas sektor. Hal ini termasuk mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola, yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana.
Kerja sama	Belum terdapat mekanisme kerja sama multi-pihak baik di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan membangun kembali lebih baik. Hal ini mencakup masalah seperti ketersediaan pelayanan air minum dan air bersih.	Tertanamnya budaya gotong royong di tengah masyarakat dapat menjadi mekanisme efektif untuk menangani dampak COVID-19 di Kota Gorontalo.

Praktik Baik di Kota Gorontalo

Ada beberapa program yang dinilai berhasil membantu masyarakat menghadapi dampak sosial di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program untuk memberdayakan kelompok yang terpuruk di masa pandemi COVID-19, sekaligus mengurangi angka pengangguran. Program ini bersinergi dengan Patali Shopping Point (PSP), sebuah inovasi yang menggunakan aplikasi telepon seluler untuk memproses pembelian di pasar. Inovasi ini mengubah pola transaksi di pasar, menggunakan basis teknologi yang sesuai dengan tuntutan di masa pandemi COVID-19.

Ada juga bantuan sosial berbentuk kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk pemilik becak motor (bentor). Setiap bulannya, satu unit bentor mendapat kupon Rp60.000 untuk pengisian BBM. Selain itu, masih ada bantuan untuk penggiat pariwisata, program perlindungan sosial, keringanan pajak, keringanan kepada para pelanggan Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM), dan berbagai pelatihan untuk masyarakat.

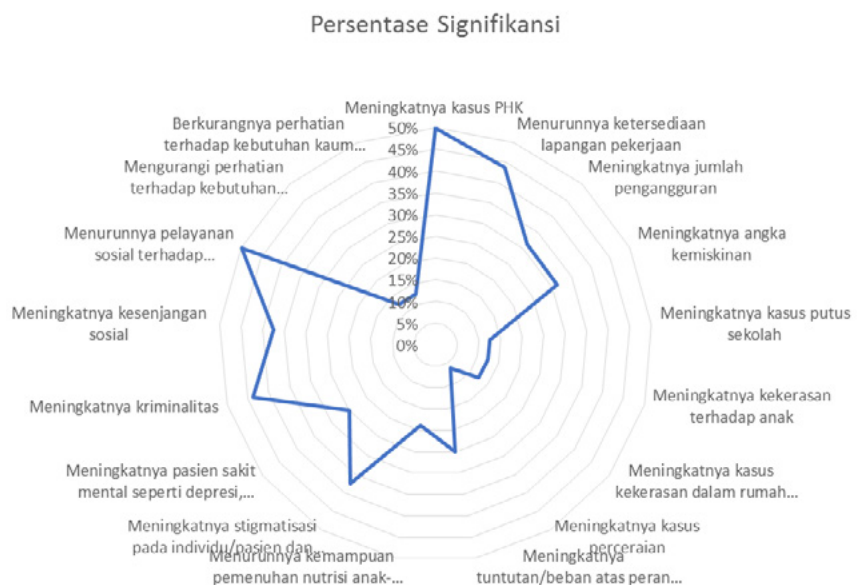
Dengan berbagai inovasi tersebut, Gorontalo berhasil memperoleh penghargaan Tim Pemantauan Inflasi Daerah (TPID) Award untuk wilayah Sulawesi. Pemerintah Kota Gorontalo dianggap berhasil mengendalikan inflasi daerah di tengah pandemi COVID-19.

6.2. Kota Mataram

Kota Mataram adalah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Kota Mataram memiliki wilayah seluas 61,3 km² dengan total penduduk lebih dari 486 ribu jiwa, dan populasi terpadat berada di Kecamatan Ampenan. Pemerintah Kota Mataram mencatat 17 ribu pengangguran (2020) dan 43 ribu orang penduduk miskin (2019). Sektor perdagangan dan jasa di Kota Mataram terdampak pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan penurunan penghasilan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks COVID-19, Kota Mataram memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Perda tersebut di antaranya mengatur tentang denda yang dapat dikenakan pada warga yang tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19 di masa pandemi ini.

**Diagram 2. Ringkasan Dampak Sosial
COVID-19 di Kota Mataram**



Dalam diagram di atas terlihat bahwa dampak sosial yang terjadi dan dirasa signifikan di Kota Mataram adalah meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menurunnya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, dan menurunnya jumlah lapangan pekerjaan.

Tabel 7. Pemetaan peluang dan tantangan Pemerintah Kota Mataram dalam mengelola dampak sosial COVID-19.

Aspek	Permasalahan dan tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi, karena Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus tetap dipenuhi dalam pelaksanaan berbagai aktivitas secara daring (<i>online</i>). Selain itu, SDM yang dengan kemampuan teknologi informasi yang baik diperlukan untuk mendata penerima bantuan sosial</p>	<p>Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap berbagai peraturan dari pemerintah pusat, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 untuk Membangun Kembali Lebih Baik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pemahaman ini menjadi modal dasar untuk rencana aksi di daerah.</p>
Kesadaran	<p>Tantangan penegakan disiplin pada penerapan protokol COVID-19 di masyarakat secara umum, khususnya di instansi perkantoran, hotel dan restoran.</p>	<p>Interaksi yang intens dengan penerima manfaat program-program pemerintah, misalnya para pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Para siswa yang mendapat beasiswa dari sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.</p>
Koordinasi	<p>Masih ada potensi bencana lain selain pandemi COVID-19 yang bisa terjadi, seperti gempa bumi misalnya. Perlunya koordinasi antara OPD, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat terkait masalah ini.</p> <p>Kota Mataram yang saat ini karakternya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, memerlukan revitalisasi mata pencaharian dan pola koordinasi lintas sektor dalam era AKB.</p> <p>Harus ada sinergi antara berbagai dinas pemerintahan di kota ini, misalnya sinergi antara Dinas Koperasi UKM dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>	<p>Adanya stimulus pariwisata untuk hotel dan restoran dengan penundaan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat. Selain itu ada juga kebijakan penundaan/keringanan membayar pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi UMKM dan koperasi.</p> <p>Dokumen formal, misalnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang memuat program terkait pandemi. Misalnya, penanganan untuk korban dan pemulihan kembali dari dampak bencana non-alam COVID-19, yang mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan hingga bidang sosial.</p> <p>Pemantauan melalui Sistem Informasi Geografis dan koordinasi dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Pola koordinasi atau komunikasi dengan OPD lainnya juga bisa menjadi potensi untuk pelatihan.</p>
Kerja sama	<p>Diperlukan inovasi dan kerja sama untuk menjawab tantangan pada aspek penanganan dampak ekonomi, terutama bagaimana menjaga supaya dunia usaha tetap berjalan. Salah satu caranya adalah dengan tetap menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS).</p> <p>Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak.</p>	<p>Berbagai program dan kegiatan yang fokus membangun kapasitas SDM. Misalnya, pusat layanan usaha terpadu untuk UMKM yang dilengkapi bimbingan teknis, sehingga masyarakat dapat menggunakan bantuan dari pemerintah.</p>

Praktik Baik di Kota Mataram

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Mataram, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Bantuan Sosial JPS Gemilang saat pandemi yang bersumber dari APBD provinsi sehingga dalam memantau pendistribusian bantuan tersebut sudah memakai teknologi informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki data melalui aplikasi yang dimaksud saat pendistribusian bansos di seluruh kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, untuk memantau pendistribusian JPS yang bersumber dari APBD Kota Mataram, Kota Mataram melakukannya dengan manual dengan cara koordinasi dan monitoring evaluasi biasa dan belum menggunakan sistem informasi.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan BPBD Kota Mataram, Kota Mataram juga melaksanakan program khusus, yaitu Penanganan COVID-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) yang memberdayakan masyarakat dari lingkup terkecil (BNN Kota Mataram, 2020).

6.3. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia, yang terbagi menjadi lima kota madya yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Total luas wilayahnya adalah 662,33 km². Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk 10,557 juta jiwa. Tingkat penganggurannya berada di angka 572 ribu jiwa (2020) dan total penduduk miskinnya adalah 365 ribu jiwa (2019). Terkait penanganan COVID-19, DKI Jakarta sejak Januari 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21/SE/2020 tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 dengan mendeteksi, mencegah, merespons, dan mengantisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat COVID-19.

Hingga saat ini, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait COVID-19 lebih bertumpu pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penularan. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan Rp54 miliar (melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) untuk pelaksanaan tugas kesehatan termasuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/SE/2020 untuk menyesuaikan penggunaan komponen belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Kesetaraan dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tahun anggaran 2020.

Persentase Signifikansi

Kategori	Persentase Signifikansi
Berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan kaum	45,00%
Menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan	35,00%
Meningkatnya jumlah pengangguran	40,00%
Meningkatnya angka kemiskinan	30,00%
Meningkatnya kasus putus sekolah	15,00%
Meningkatnya kekerasan terhadap anak	10,00%
Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	10,00%
Meningkatnya kasus kekerasan seksual	10,00%
Meningkatnya beban atas peran wanita dalam keluarga	10,00%
Meningkatnya kemampuan pemenuhan nutrisi anak-anak	10,00%
Meningkatnya stigma pada individu/pasien dan keluarga yang positif	10,00%
Meningkatnya pasien sakit mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dll.	10,00%
Meningkatnya kriminalitas	10,00%
Meningkatnya kesenjangan sosial	10,00%
Menurunnya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas	10,00%

Menangani Dampak Sosial Pandemi COVID-19 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Tabel 8. Pemetaan peluang dan tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dampak sosial COVID-19

Aspek	Permasalahan dan tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia (SDM)	Aspek SDM sangatlah vital dalam menopang perekonomian dan pelayanan publik di DKI Jakarta, terutama bagaimana caranya mencapai kinerja maksimal pada masa PSBB, yang dijalankan beberapa kali di DKI Jakarta. PSBB berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang berimplikasi pada peningkatan kemiskinan.	Terdapat program perlindungan kesehatan dan program Belajar Bersama Jakarta untuk mengembangkan SDM.
Kesadaran	Kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol COVID-19 dan peraturan lainnya yang berlaku, khususnya bagi berbagai instansi dan perkantoran.	Komitmen pemerintah provinsi dalam menerapkan kebijakan nasional melalui berbagai mekanisme, salah satunya dengan program Jakarta Tanggap COVID-19 dan situs web khusus (corona.jakarta.go.id)
Koordinasi	Tantangan dalam pola koordinasi tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Tantangan terbesar adalah koordinasi dalam mitigasi kebencanaan lainnya di saat pandemi COVID-19, yaitu berkaitan dengan isu perubahan iklim, khususnya bencana banjir.	Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merespons pengumuman dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang kewaspadaan terhadap curah hujan tinggi saat pandemi COVID-19.
Kerja sama	Petunjuk kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tidak bergantung pada salah satu atau beberapa OPD di saat Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).	Adanya program KSBB yang membuka peluang model kerja sama baru dengan memanfaatkan media digital dengan platform sosial baru bernama Jakarta Development Collaboration Network (JDCN).

Praktik Baik di Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta melaksanakan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui mekanisme Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). Program ini menggunakan model kerja sama multi-pihak di saat pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan media digital. Platform kolaborasi digital ini menghasilkan *output* berupa sistem pemantauan kolaborasi yang berisi sistem pengajuan dan penilaian proposal kolaborasi, termasuk pelaksanaan dan pemantauan pencapaiannya.

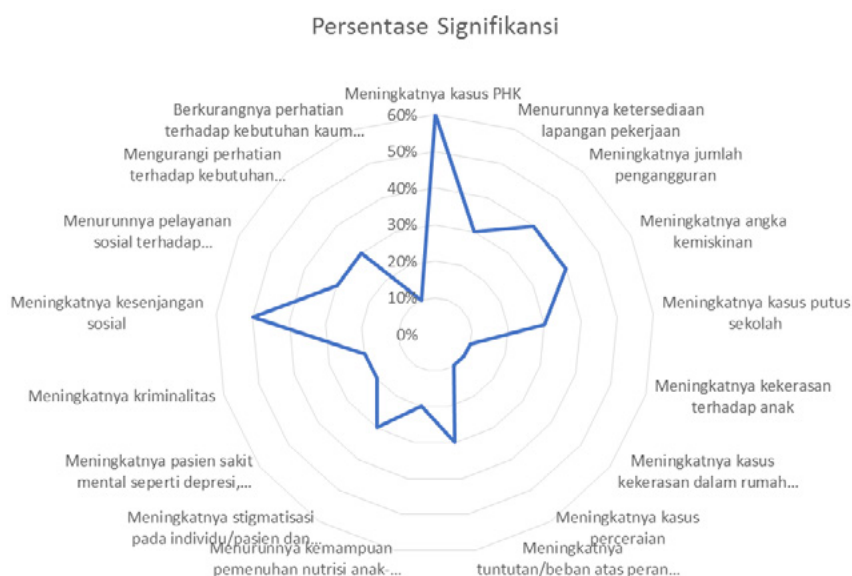
6.4 Provinsi Lampung

Provinsi Lampung adalah provinsi di ujung selatan pulau Sumatra dengan luas daerah lebih dari 35 ribu km², yang terdiri dari 13 kabupaten dan dua kota. Kabupaten di Provinsi Lampung adalah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Dua kota di provinsi ini adalah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung,

Pada 2019, provinsi Lampung tercatat memiliki 8,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tercatat lebih dari 171 ribu jiwa (2019). Total penduduk miskin tercatat lebih dari 1 juta jiwa (2019). Pemerintah Provinsi Lampung melakukan respons awal terhadap COVID-19 dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. 443/203A/155/2020 tentang kesiapsiagaan jajaran kesehatan dalam penyebaran penumonia.

Menanggapi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Keputusan Gubernur No.G158/B.03/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keputusan Gubernur Lampung No.G/173/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung. Kemudian ada juga Instruksi Gubernur Lampung No 440/1022/06/2020 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan menghadapi infeksi COVID-19 di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, terdapat Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/118/07/2020 ttg penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Pada bulan Agustus 2020, diadakan sosialisasi peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Lampung.

Diagram 4. Ringkasan Dampak Sosial COVID-19 di Provinsi Lampung



Dari diagram di atas, terlihat bahwa responden banyak menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada peningkatan kasus PHK, peningkatan kesenjangan sosial, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 9. Pemetaan peluang dan tantangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola dampak sosial COVID-19

Aspek	Permasalahan dan tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kemampuan SDM internal dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan publik.	Komitmen kepala daerah melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung.
Kesadaran	<p>Tantangan pada sosialisasi dan tetap menjaga agar dunia usaha khususnya hotel, café, dan restoran tetap memastikan pengunjung mereka menerapkan protokol COVID-19 khususnya 3M.</p> <p>Pengawasan pintu masuk ke Provinsi Lampung khususnya pintu masuk via laut, Lampung Selatan (Pelabuhan Bakauheni) serta mempertimbangkan mobilitas tinggi masyarakat serta pegawai pemerintah.</p>	Kedisiplinan pemerintah daerah dalam melakukan razia dan sosialisasi penegakan protokol COVID-19 di tengah masyarakat.

Tantangan koordinasi lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam berinovasi untuk memulihkan ekonomi dan membangun kembali lebih baik.

Koordinasi

- Belum adanya koordinasi yang intensif pada aspek kebencanaan fisik, yaitu kemungkinan terjadi banjir dan tsunami pada saat pandemi.
- Tantangan koordinasi untuk memastikan sinkronisasi data digital antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki data terlalu panjang, dari mulai desa hingga provinsi. Perlu ada mekanisme yang sederhana dari level desa hingga pusat.

Adanya satuan tugas COVID-19 yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang organisasi.

Kerja sama

Masih minimnya kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama *Civil Society Organizations* (CSOs).

Pengusulan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Praktik Baik di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan peran perempuan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan program Saatnya Ikut Bergerak untuk Rakyat (SIGER).

Terdapat konsistensi dalam proses penanganan pasien COVID-19 dan penegakan disiplin protokol COVID-19. Patut dicatat bahwa angka kesembuhan penderita COVID-19 Provinsi Lampung lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi Lampung juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Inovasi Daerah Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dari Kementerian Dalam Negeri. Ketiga sektor yang mendapat penghargaan adalah sektor restoran, sektor pasar modern/mal, dan sektor pasar tradisional.

6.5 Analisis Data Simultan Semua Daerah (Kota Gorontalo, Kota Mataram, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung)

Data dalam riset ini menunjukkan bahwa aspek sosial dalam rumah tangga (seperti KDRT, kekerasan pada anak, dan perceraian) tidak terlalu dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Responden optimis kehidupan sosial kemasyarakatan tetap kondusif walaupun dilanda pandemi COVID-19. Hanya 2,3 persen responden yang menyatakan bahwa aspek sosial tersebut terdampak oleh COVID-19.

Diagram 5. Ringkasan Dampak Sosial COVID-19 di 4 Daerah

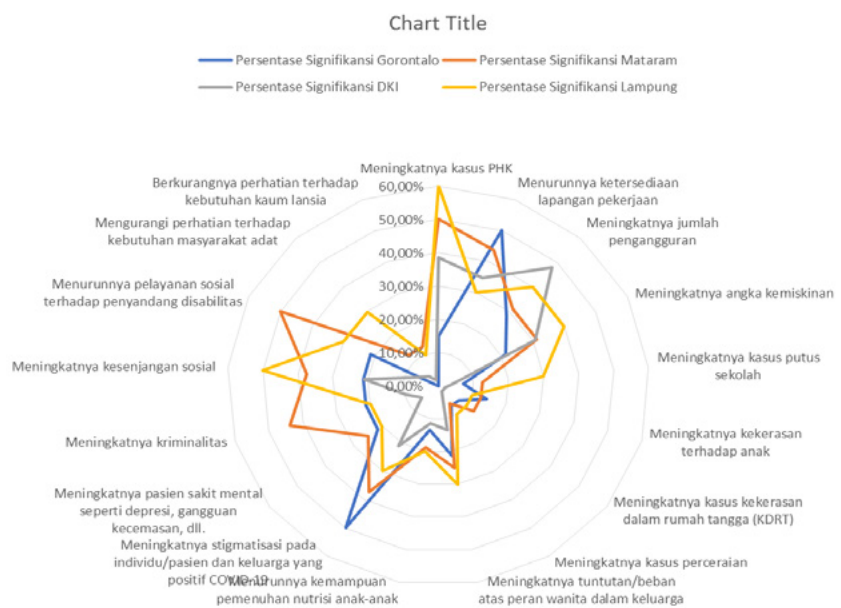


Diagram di atas menunjukkan beberapa dampak pandemi COVID-19 di empat lokasi penelitian di Indonesia. Dampak sosial terbesarnya adalah menurunnya jumlah lapangan kerja, meningkatnya jumlah pengangguran, dan serta meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, ada juga stigmatisasi dan turunnya pelayanan sosial terhadap bagi para penyandang disabilitas.

6.5.1 Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Secara umum, responden mengkhawatirkan dampak sosial dari pandemi COVID-19. Terjadi konsistensi persepsi responden bahwa COVID-19 secara signifikan berdampak pada penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan (48,8 persen). Kondisi ini memicu peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Sebanyak 34,9 persen responden menganggap angka kemiskinan secara otomatis mengalami kenaikan di masa pandemi COVID-19. Dengan begitu, dampak yang perlu disikapi adalah terjadinya kesenjangan sosial.

Pandemi COVID-19 meningkatkan beban pekerjaan perempuan dalam rumah tangga, yang dinilai cukup tinggi. Hingga 51,4 persen responden menyatakan adanya signifikansi kenaikan beban perempuan sehari-hari di dalam rumah tangga. Tetapi, untuk beberapa indikator terkait tingginya interaksi individu dalam satu keluarga selama pandemi yang diprediksi memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kekerasan terhadap anak, secara umum responden menilai bahwa COVID-19 tidak memperlihatkan dampak yang signifikan. Hal ini dikonfirmasi melalui beberapa wawancara dengan responden yang mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak atau rentan dalam masa pandemi COVID-19 telah mendapatkan beberapa skema bantuan ekonomi dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, melalui pemberian bahan bantuan makanan pokok dan uang tunai.

Tingkat perhatian terhadap kebutuhan kaum lansia, masyarakat adat dan pelayanan terhadap kaum disabilitas dinilai tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi kita harus mencatat bahwa belum ada inovasi dalam pelayanan khusus pada lansia, masyarakat adat dan kaum disabilitas. Responden menilai ketiga faktor tersebut tetap menjadi fokus sebelum dan sesudah COVID-19. Di sisi lain, kriminalitas berpotensi mengalami peningkatan walaupun pemerintah pusat dan daerah memberikan beragam bantuan stimulus ekonomi.

6.5.2 Kemitraan Multi-Pihak dan Inovasi

Responden membedakan antara (1) kemitraan multi-pihak untuk menghadapi dampak sosial, dan (2) kemitraan multi-pihak dalam membangun kembali dengan lebih baik dan lebih kuat. Untuk kemitraan yang terkait dampak sosial, mayoritas responden menyatakan kemitraan tersebut tidak signifikan untuk dilakukan. Responden menyatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 pada angka KDRT, kekerasan anak dan perceraian tidak terlalu besar, sehingga mereka merasa pembentukan kemitraan multi-pihak tidak signifikan untuk menangani dampak tersebut. Di sisi lain, responden menyatakan bahwa kemitraan multi-pihak sangat penting untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih kuat, terutama untuk sektor ekonomi.

Hal yang menarik, walaupun terjadi beberapa dampak sosial selama pandemi COVID-19, pemerintah daerah tetap memandang pentingnya kebijakan atau program langsung yang berasal dari pemerintah pusat. Mayoritas responden menilai bahwa tidak signifikan bagi pemerintah daerah memiliki peraturan dan kebijakan sendiri untuk merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19. Hanya 2,3 persen responden yang menyatakan hal tersebut signifikan untuk dilakukan/dimiliki.

Terdapat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pada aspek kebijakan dan program, meskipun responden menilai peraturan dan kebijakan daerah tidaklah cukup untuk mengatasi kondisi pandemi COVID-19. Sebanyak 93,2 persen responden memandang perlu adanya keseragaman kebijakan untuk seluruh daerah dalam menghadapi COVID-19. Begitu pula terkait inovasi pemerintah daerah dalam merespons dan memulihkan dampak sosial yang fokus pada manusia (*people-centered*) dan bersifat inklusif. Responden menyatakan hal ini tidak signifikan untuk dilakukan.

6.5.3 Program Prioritas

Secara umum, responden setuju akan adanya program-program yang spesifik di masa pandemi COVID-19, yang berasal dari pemerintah pusat. Responden menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait program-program yang diberikan kepada masyarakat, misalnya:

- 1) Pemberian bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak COVID-19.
- 2) Pemberian bantuan sosial untuk memastikan pemenuhan nutrisi bagi anak yang berusia di bawah lima tahun.
- 3) Pemberian bantuan sosial kepada orang/kelompok berkebutuhan khusus.
- 4) Perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.
- 5) Penyediaan fasilitas konsultasi dan penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 6) Penyediaan pelayanan kesehatan mental secara gratis.



F.5.4 *Building Back Better* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Mayoritas responden menyatakan bahwa COVID-19 memberikan dampak sosial yang menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kebijakan meminimalisasi interaksi sosial menyebabkan tingginya konsumsi informasi oleh masyarakat. Hal ini dinilai dari tingkat produksi informasi *hoax* yang tinggi yang dapat menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Beberapa kebijakan, strategi dan program yang oleh responden dinyatakan penting untuk dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Kebijakan, Strategi dan Program



Belajar dan berkolaborasi dengan daerah baik di dalam dan luar negeri yang sukses merespons dan memulihkan dampak sosial pandemi COVID-19.



Pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru.



Investasi pemerintah untuk meningkatkan teknologi internet dan komunikasi dalam menunjang pendidikan.



Memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan publik.



Sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap dampak sosial COVID-19.

Artinya, ada dua hal penting dalam era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan membangun kembali lebih baik, yaitu (1) terciptanya kolaborasi dengan berbagai sektor dalam rangka pemulihan dampak sosial pandemi COVID-19 dan (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru yang disesuaikan dengan kondisi saat pandemi COVID-19. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi yang dipicu oleh pemerintah dengan cara melibatkan masyarakat. Selain itu, hal penting lainnya adalah hadirnya sistem pelayanan khusus yang berbasis segmen/klaster sehingga penanganannya lebih spesifik.

Pemerintah dipandang perlu segera melakukan investasi teknologi komunikasi dan internet, karena besarnya permintaan kebutuhan yang terkait kedua hal tersebut dari sisi masyarakat di masa pandemi. Responden juga menilai pentingnya kebijakan fiskal untuk mengatasi kasus tingginya pengangguran. Responden berpendapat bahwa semua kebijakan tersebut perlu diterapkan dengan memberikan akses yang sama (tidak diskriminatif).

Koordinasi dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) juga penting dan diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kesetaraan gender harus menjadi prioritas dalam kebijakan, karena baik perempuan maupun lelaki sama-sama berperan dalam perekonomian. Penting juga untuk membangun sistem perlindungan sosial yang responsif dan tepat sasaran terhadap dampak COVID-19. Secara rinci, beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam era AKB dan membangun kembali lebih baik adalah:

Kebijakan, Strategi dan Program/ Kegiatan



Partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19.



Pelayanan sistem kesehatan mendasar pada kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, penyandang difabel).



Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan saat pandemi dan pasca pandemi.



Investasi pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur yang berkelanjutan (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) dalam menghadapi krisis saat ini dan di masa mendatang.



Kebijakan fiskal yang merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19 untuk mengatasi pengangguran.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara, responden menilai pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan beberapa program dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di era pandemi COVID-19, seperti beberapa aspek di bawah ini:

Beberapa aspek dalam Standar Pelayanan Minimal



Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.



Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.



Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan luar panti.



Pelayanan pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan khusus.



Pelayanan kesehatan ibu hamil.



Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.

6.5.5 Tantangan Ke Depan

Manajemen Data

Sebanyak 35,9 persen responden menilai tidak ada perubahan dalam proses pengumpulan data untuk membuat kebijakan. Namun, terdapat kesulitan dalam proses sinkronisasi dan validasi data karena rendahnya interaksi secara langsung ke masyarakat. Responden cukup sulit menghitung kebutuhan pemenuhan dasar karena besarnya area dampak COVID-19 dan rendahnya interaksi langsung kepada masyarakat.

Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi TPB

Dalam konteks penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang mengarah pada pencapaian TPB, responden menilai adanya kesulitan dalam masa pandemi COVID-19, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB. Namun untuk kegiatan yang tidak memerlukan interaksi dengan banyak orang, proses analisis data dan diseminasi informasi tidak mengalami kesulitan. COVID-19 secara signifikan memengaruhi kemajuan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dari aspek sosial, angka kemiskinan, pengangguran yang tinggi, PHK dan penurunan lapangan kerja adalah beberapa dampak utama dari pandemi. Aspek sosial lain yang juga muncul selama pandemi COVID-19 adalah meningkatnya beban kerja perempuan dalam keluarga, meningkatnya angka putus sekolah siswa, serta kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.

Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 telah menantang pencapaian agenda TPB 2030 tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Perawatan kesehatan yang tidak terputus, akses yang terbatas terhadap makanan dan layanan gizi, kematian bayi dan anak di bawah usia lima tahun dan ibu hamil juga dapat terjadi selama pandemi. Selain itu, ketidakhadiran siswa di sekolah dalam waktu lama mengakibatkan tingkat retensi dan kelulusan yang lebih rendah dan ini memperburuk hasil belajar.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pilar-pilar TPB lainnya yaitu pilar lingkungan, ekonomi serta hukum dan pemerintahan, seperti pada Sasaran 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan Sasaran 13 (Mengatasi Perubahan Iklim untuk pilar lingkungan, Sasaran 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) untuk pilar ekonomi, dan Tujuan 16 (Perdamaian Keadilan dan Lembaga yang Kuat) untuk pilar hukum dan pemerintahan.

Saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, di beberapa daerah di Indonesia telah terjadi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, kebakaran, dan banjir. Penanganan dampak sosial COVID-19 serta pemulihan dari pandemi memerlukan kebijakan dan tindakan yang transformatif, inklusif, serta mengurangi risiko krisis di masa depan. Semua hal ini harus sejalan dengan pencapaian TPB.

Pasar Terapung di Pulau Kaledupa, Wakatobi.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Kesimpulan dan Rekomendasi

VII

Penelitian ini telah memetakan dampak sosial COVID-19. Dampak yang paling signifikan adalah pada aspek sosial ekonomi, yaitu meningkatnya angka kemiskinan, adanya kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup, tingginya angka pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua ini berdampak pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Diperlukan intervensi kebijakan dan program pada beberapa indikator TPB, agar pencapaiannya tidak menurun.

Karena itu, dalam konteks TPB, penelitian ini menghasilkan empat usulan kebijakan untuk mengelola dampak sosial pandemi COVID-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai sektor dalam rangka pemulihan dampak sosial pandemi COVID-19 melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru. Kedua, kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, dengan memberikan kesempatan yang setara dalam pelayanan publik. Ketiga, kebijakan membangun sistem dan transformasi digital untuk perlindungan, bantuan, dan keamanan sosial yang responsif. Keempat, kebijakan investasi data dan kebijakan integrasi untuk merespons krisis dan mendukung percepatan TPB.

Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan enam rekomendasi aksi .

1. Kolaborasi *Pentahelix* dan Kemitraan dengan Desain Partisipatif

Pencapaian TPB sangat tergantung pada kemitraan dengan para pemangku kepentingan di semua tingkatan. Perlu kolaborasi yang solid, koordinasi vertikal yang konsisten antara otoritas nasional dan lokal, serta koordinasi lintas sektor yang optimal di masing-masing daerah melalui desain partisipatif (*co-design*) para pemangku kepentingan. Pendekatan kolaborasi model *pentahelix* dapat dipakai dengan efektif untuk menangani dampak sosial COVID-19. Model ini melibatkan lima pilar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, masyarakat, dan media massa. Salah satu contohnya adalah Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)¹ dan Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)², jejaring mitra pembangunan lokal dan internasional di DKI Jakarta untuk membangun kota menggunakan model kolaborasi yang berkelanjutan.

¹ <https://corona.jakarta.go.id/id/platform-ksbb>

² <https://jdcn.jakarta.go.id/>

2. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Bantuan Sosial

Transformasi digital pada pelayanan publik di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, kesehatan, dan jaminan sosial sangatlah penting untuk dilakukan. Digitalisasi pelayanan publik adalah faktor krusial untuk menyediakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Digitalisasi pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan membangun fondasi untuk pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lebih aman, lebih setara, inklusif dan berkelanjutan. Integrasi data kesehatan dasar, sosial dan ekonomi dapat memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan begitu, penduduk yang paling rentan dan paling membutuhkan bantuan dapat terpantau dengan baik. Pelayanan publik dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan aplikasi digital yang memudahkan pemerintah daerah dalam pemberian layanan dan program yang tepat sasaran berbasis data elektronik. Contohnya adalah aplikasi Siap Tanggap (SIAP) yang diujicoba di Kota Semarang pada Juni 2020 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Aplikasi yang mudah digunakan (*user friendly*) ini sangat berguna di periode AKB karena dapat menjangkau masyarakat luas tanpa meningkatkan risiko penularan COVID-19. Tautan (*link*) kuesioner untuk SIAP dikirimkan melalui WhatsApp, dan berisi pilihan ganda sederhana seperti “apakah persediaan makanan mencukupi?”. Aplikasi ini juga merekam data lokasi responden, sehingga kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan mereka dapat dipantau dari jarak jauh.

3. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Ini adalah saatnya mengedepankan kemitraan, inovasi, dan digitalisasi untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang harus diutamakan adalah kaum muda, perempuan, serta kelompok rentan di masyarakat. Ekonomi minim kontak fisik (*less physical contact economy*) juga harus diutamakan. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi secara daring (*online*). Cara lain meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan mendorong tumbuhnya wirausaha, mengadakan program inkubasi bisnis, dan program padat karya seperti Padat Karya Tunai (PKT) atau *Cash for Work*. PKT adalah pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan³. Beberapa contoh program PKT yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

³ [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-ske-ma-padat-karya-tunai-2#:~:text=Padat%20karya%20tunai%20\(Cash%20for,daya%20beli%2C%20mengurangi%20kemiskinan%2C%20dan](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-ske-ma-padat-karya-tunai-2#:~:text=Padat%20karya%20tunai%20(Cash%20for,daya%20beli%2C%20mengurangi%20kemiskinan%2C%20dan)

(PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)⁴.

4. Pelatihan Literasi Digital, Layanan Internet, dan Inklusi Digital

Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari sumber yang diakses secara digital. Masyarakat di daerah, terutama perempuan dan kaum muda, sangat membutuhkan pelatihan literasi digital. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan alat digital dan sumber daya daring (*online*), mempermudah aktivitas, memberikan fleksibilitas pekerjaan di masa transisi, sekaligus menyiapkan masa depan pekerjaan mereka. Salah satu contoh program literasi digital adalah Gapura Digital⁵ dari Google, program pelatihan yang mendukung pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Lebih jauh lagi, meningkatnya literasi digital dan hadirnya layanan internet akan mengurangi kesenjangan akses informasi bagi lansia, masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas. Inklusi digital sangatlah penting di masa pandemi ini karena termasuk strategi yang berbiaya rendah, berkelanjutan, dan dapat diskalakan. Inklusi digital di masyarakat pada pasca pandemi COVID-19 sebaiknya fokus pada aktor/pemangku kepentingan. Misalnya, training peningkatan kapasitas pelaku ekonomi digital, khususnya komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku bisnis pariwisata.

5. Investasi Infrastruktur Digital

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kita membutuhkan kepemimpinan, inovasi, serta kolaborasi antar pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Di samping semua faktor krusial tersebut, kita tidak mungkin mencapai TPB tanpa data yang memadai. Investasi pembangunan infrastruktur digital untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan data sangatlah penting. Ditambah, pembangunan infrastruktur digital dapat menciptakan kegesitan (*agility*) dan ketahanan (*resilience*) bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial ekonomi COVID-19. Artinya, dukungan infrastruktur digital dapat memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara maksimal selama pandemi. Pihak swasta dapat digandeng sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur digital ini. Investasi pada pembangunan infrastruktur digital meliputi pembangunan fasilitas pusat teknologi informasi dengan *software* dan *hardware* yang mendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung yaitu pasokan listrik. Pembangunan infrastruktur digital secara otomatis dapat mendukung kesuksesan

⁴ <https://www.pu.go.id/berita/view/18595/dorong-pemulihan-ekonomi-nasional-realisasi-belanja-infrastruktur-pupr-tahun-2020-capai-44>

⁵ <https://gapuradigital.withgoogle.com/>

Satu Data Indonesia (SDI) dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dikelola, diintegrasikan, dan dipertanggungjawabkan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan perluasan infrastruktur digital juga akan mendukung pemerataan akses internet yang berkualitas bagi masyarakat secara luas.

6. Membangun Kapasitas Digital Aparatur Pemerintah Daerah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu modal utama di era digital. Karena itu, SDM di level pemerintah daerah, harus kompeten dan inovatif di bidang teknologi informasi. Mereka adalah ujung tombak untuk melayani masyarakat serta meningkatkan inovasi di sektor publik. Terutama bagi SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik secara digital. Kemampuan digital para aparatur pemerintah daerah juga akan sangat membantu dalam manajemen data Jaring Pengaman Sosial (JPS), penganggaran, serta sosialisasi program. Ada dua cara utama untuk membangun kapasitas digital aparatur pemerintah daerah, yaitu dengan pelatihan dan pendampingan teknis (*technical assistance*).

Anak-anak nelayan di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Daftar Pustaka

- BNN Kota Mataram. (2020). "Rapat Pembahasan Penanganan COVID-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) di Kelurahan Cakranegara selatan Baru". <https://mataramkota.bnn.go.id/rapat-pembahasan-penanganan-COVID-19-berbasis-lingkungan-pcbl-di-kelurahan-cakranegara-selatan-baru/>
- BPS Kota Gorontalo. (2020). "Kota Gorontalo Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan". Disadur dari Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo: <https://gorontalokota.bps.go.id/publication/2020/02/28/8feb21a07450334be2dfb5fb/kota-gorontalo-dalam-angka-2020--penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html>
- BPS Kota Mataram. (2020). "Kota Mataram Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan". Disadur dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram: <https://mataramkota.bps.go.id/publication/2020/02/28/17524ca47b1f1cea97abbeec/kota-mataram-dalam-angka-2020.html>
- BPS Provinsi Lampung. (2020). "Provinsi Lampung Dalam Angka 2020". Disadur dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung: <https://lampung.bps.go.id/publication/2020/04/27/8875e8b18ee22402d6a3f782/provinsi-lampung-dalam-angka-2020.html>
- Danermark, B., Ekstrom, M., Jakobsen, L., and Karlsson, J. Ch. (2002). *Explaining Society: Critical Realism in the Social Science*. Routledge. London: Routledge.
- Elder-Vass, D. (2010). *The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency*. Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press UK.
- Filho, W., et al. (2020). COVID-19 and the UN Sustainable Development. Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity? *Sustainability*. 2020; 12(13):5343. <https://doi.org/10.3390/su12135343>
- IMF. (2020). A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. *World Economic Outlook Update*. Disadur dari International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEUpdateJune2020>
- IPB. Experts Discuss the Impact of COVID-19 on National SDGs. Disadur dari IPB University: <https://ipb.ac.id/news/index/2020/05/experts-discuss-the-impact-of-COVID-19-on-national-sdgs/5ba317bed272bfff92f410e05acb045>
- OECD. (2020). "The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance." *OECD Policy Responses to Coronavirus*. Disadur dari Organisation for Economic Co-operation and Development: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-COVID-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/>
- Sanjoyo. (2020). *Penyesuaian Strategi, Rencana Aksi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB/SDGs di Masa Pandemi COVID-19*. Presentation, Diskusi Daring TPB dan COVID-19 #9: "Penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam Upaya Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19".
- SDGs Center UNILA. (2020). Penelitian Dampak Sosial COVID-19 di 4 Daerah di Indonesia. Unpublished.

Solberg, E. & Akufo-Addo, N. (2020). Why we cannot lose sight of the Sustainable Development Goals during coronavirus. Disadur dari World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-pandemic-effect-sdg-un-progress>

United Cities and Local Governments Asia Pacific. (2020). *Apa yang Seharusnya Diketahui Oleh Pemerintah Daerah: Panduan Singkat dan Pembelajaran dari Pemerintah Daerah di Asia*. Jakarta: UCLG ASPAC

United Nations. (2020). *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of COVID-19*. New York: United Nations.

United Nations. (2020). *A UN Framework for the Immediate Socio-economic Response to COVID-19*. New York: United Nations.

Yin, K. R. (2003). *Case Study Research: Design and Method*. London: Sage., UK



Lampiran 1 (Daftar Kuesioner Dan Wawancara)

Nama Responden:

Umur:

Jenis Kelamin:

Pendidikan Terakhir:

Jabatan:

Instansi/Dinas/OPD:

Provinsi:

A. DAMPAK SOSIAL COVID-19

- Sejauh mana COVID-19 berdampak terhadap aspek sosial saat ini?
 1. Sangat berdampak
 2. Berdampak
 3. Tidak berdampak
 4. Sangat tidak berdampak
- Dalam skala 1 sampai 5 (dengan 1 sebagai nilai terkecil dan 5 nilai terbesar), seberapa signifikan dampak sosial pandemi COVID-19 di bawah ini di daerah anda?

Dampak-dampak Sosial Pandemi COVID-19	Nilai (skala 1-5. 1 nilai terendah; 5 nilai tertinggi)
Meningkatnya kasus PHK	
Menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan	
Meningkatnya jumlah pengangguran	
Meningkatnya angka kemiskinan	
Meningkatnya kasus putus sekolah	
Meningkatnya kekerasan terhadap anak	
Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	
Meningkatnya kasus perceraian	
Meningkatnya tuntutan/beban atas peran wanita dalam keluarga	
Menurunnya kemampuan pemenuhan nutrisi anak-anak	
Meningkatnya stigmatisasi pada individu/pasien dan keluarga yang positif COVID-19	
Meningkatnya pasien sakit mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dll.	
Meningkatnya kriminalitas	
Meningkatnya kesenjangan sosial	
Menurunnya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas	
Mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat adat	
Berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan kaum lansia	

B. ASPEK KEBIJAKAN

1. Seberapa pentingkah pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam membuat peraturan atau kebijakan dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Sangat penting | 2. Penting |
| 3. Tidak penting | 4. Sangat tidak penting |

2. Seberapa cukupkah peraturan atau kebijakan di daerah anda dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Sangat cukup | 2. Cukup |
| 3. Tidak cukup | 4. Sangat tidak cukup |

Dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19, seberapa penting koordinasi lintas sektor?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Sangat penting | 2. Penting |
| 3. Tidak penting | 4. Sangat tidak penting |

3. Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang *inovatif* dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19 yang berfokus pada manusia (*people-centred*)?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Sangat perlu | 2. Perlu |
| 3. Tidak perlu | 4. Sangat tidak perlu |

4. Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang inklusif dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Sangat perlu | 2. Perlu |
| 3. Tidak perlu | 4. Sangat tidak perlu |

5. Apakah Anda setuju bahwa program-program di bawah ini penting dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?

Program	Setuju/Tidak setuju
Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19.	
Pemberian bantuan sosial pemastian pemenuhan nutrisi anak di bawah 5 tahun.	
Perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.	
Penyediaan fasilitas konsultasi dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	
Penyediaan pelayanan kesehatan mental gratis.	

C. PELUANG DAN TANTANGAN DALAM ERA NORMAL BARU

1. Apakah kemudahan beredarnya hoax (informasi palsu) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?
 1. Ya
 2. Tidak
2. Dari skala 1-5, dengan 1 sebagai "sangat tidak setuju" dan 5 sebagai "setuju", seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah ini?

Pernyataan	Nilai (skala 1-5. 1 "sangat tidak setuju"; 5 "sangat setuju")
Respons dan pemulihan dampak sosial COVID-19 membutuhkan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran	
Investasi pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur yang berkelanjutan (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) dalam menghadapi krisis saat ini dan mendatang.	
Pentingnya pelayanan sistem kesehatan primer/dasar pada kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, kaum difable).	
Membangun partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19.	
Pentingnya desain sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap dampak sosial COVID-19.	
Pentingnya meniadakan diskriminasi dan mengatasi ketidaksetaraan.	
Pentingnya pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru.	
Pentingnya belajar dan berkolaborasi dengan daerah baik di dalam dan luar negeri yang sukses dalam merespon dan memulihkan dampak sosial pandemi COVID-19.	
Pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan saat pandemi dan paska pandemi.	
Pentingnya berkoordinasi dengan masyarakat rentan dan LSM terkait respon dan pemulihan dampak sosial COVID-19.	
Pentingnya investasi pemerintah untuk peningkatan teknologi internet dan komunikasi dalam menunjang pendidikan	

3. Dari skala 1-5, dengan 1 sebagai "sangat tidak sulit" dan 5 sebagai "sangat sulit", seberapa sulitkah menurut anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru ?

Pernyataan	Nilai (skala 1-5. 1 "sangat tidak sulit"; 5 "sangat sulit")
Pengumpulan data	
Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	
Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar	
Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	

4. Menurut Anda, apakah COVID-19 memberikan dampak sosial yang menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?

1. Ya
2. Tidak

5. Urutkan (dari urutan paling prioritas diberi nomor 1 dan seterusnya) jenis standard pelayanan minimal di daerah anda yang paling dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?

Jenis pelayanan minimal	Urutan (1, 2, 3, 4 dst)
Pendidikan menengah dan khusus	
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	
rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan luar panti	
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan luar panti	
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan luar panti	
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	
pendidikan anak usia dini	
pendidikan dasar	
pelayanan kesehatan ibu hamil	
pelayanan kesehatan ibu bersalin	
pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

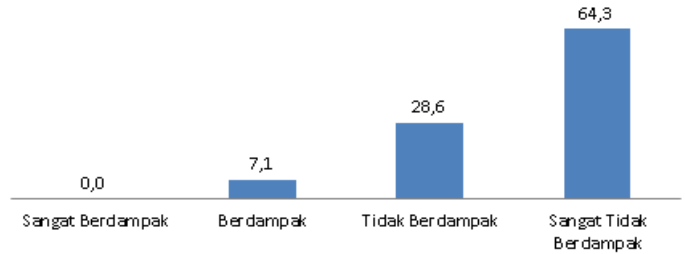
- 1) Apakah COVID-19 memberikan dampak sosial di daerah Bapak/Ibu?
 - Apabila iya, jelaskan apa saja dampak tersebut.
 - Apabila tidak, jelaskan mengapa tidak berdampak.
- 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu era normal baru?
 - Apabila iya, jelaskan sesuai pemahaman Bapak/Ibu.
 - Apabila tidak, jelaskan sesuai pemahaman Bapak/Ibu.
- 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep membangun kembali dengan lebih baik?
 - Apabila iya, jelaskan sesuai pemahaman Bapak/Ibu.
 - Apabila tidak, jelaskan sesuai pemahaman Bapak/Ibu.
- 4) Menurut bapak/ibu, apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial COVID-19 di masa pandemi dan era normal baru?
- 5) Menurut bapak/ibu, apa saja peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial COVID-19 di masa pandemi dan era normal baru?
- 6) Apakah Bapak/Ibu mengetahui aspek sosial pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?
 - Apabila iya, jelaskan apa yang Bapak/Ibu ketahui.
 - Apabila tidak, jelaskan mengapa tidak mengetahui.
- 7) Bagaimana mengelola dampak sosial akibat dari pandemi COVID-19 ? Dalam mengelola dampak sosial (pada pertanyaan 2 diatas), apakah menurut Bapak/Ibu sejalan dengan TPB?
- 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah di era normal baru terdapat mekanisme khusus dalam pelayanan publik dan sosial?
 - Apabila iya, jelaskan mekanisme tersebut.
 - Apabila tidak, jelaskan mengapa mekanisme tersebut tidak dibuat.
- 9) Apakah menurut Bapak/Ibu pelayanan publik dan sosial di era normal baru sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)?
 - Apabila iya, jelaskan alasan Bapak/Ibu.
 - Apabila tidak, jelaskan alasan Bapak/Ibu.
- 10) Menurut Bapak/Ibu, kapasitas dan kapabilitas apa yang perlu dimiliki/ ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan sosial yang memenuhi SPM?

Lampiran 2 Data Statistik

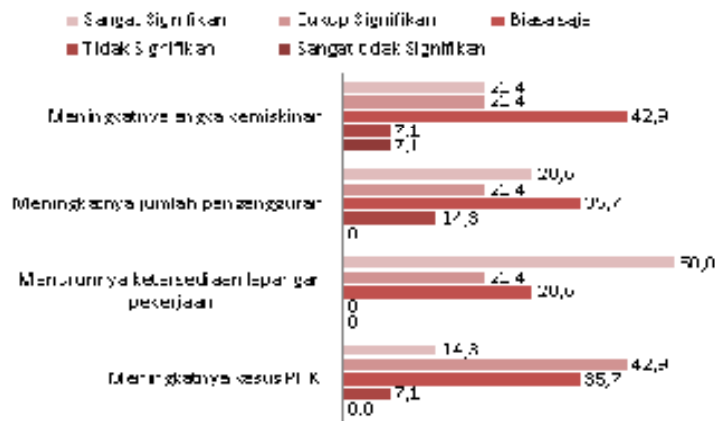
1.1 Kota Gorontalo

Secara umum responden di Kota Gorontalo menilai COVID-19 tidak memberikan dampak sosial di Gorontalo. Hanya sebesar 7,1% responden yang merasa terdampak pada aspek sosial karena pandemi COVID-19.

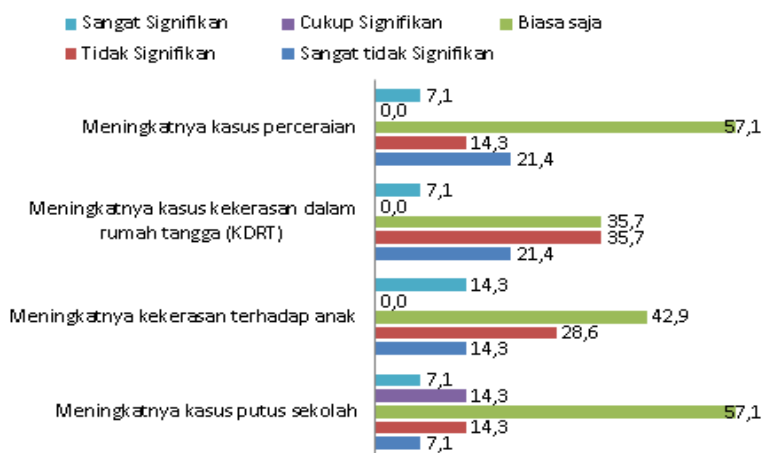
Sejauh mana COVID-19 berdampak terhadap aspek sosial saat ini?



Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19

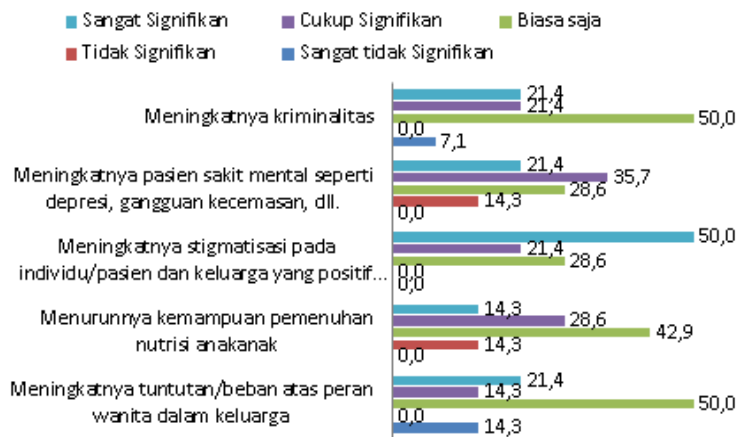


42,8% responden menganggap pandemi COVID-19 memberikan efek buruk terhadap peningkatan angka kemiskinan. Tetapi, peningkatan angka kemiskinan di Gorontalo dinilai telah terjadi walaupun tanpa adanya pandemi. Sehingga, pandemi COVID-19 akan berakibat pada penurunan lapangan kerja dan tingginya angka PHK di Gorontalo.



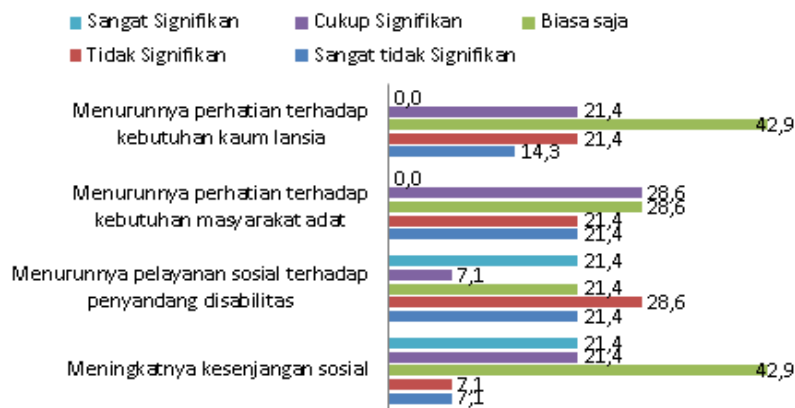
Responden tidak melihat adanya dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus perceraian, KDRT, kekerasan terhadap anak, dan kasus putus sekolah. Responden menilai masyarakat terdampak hanya di sektor ekonomi.

Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



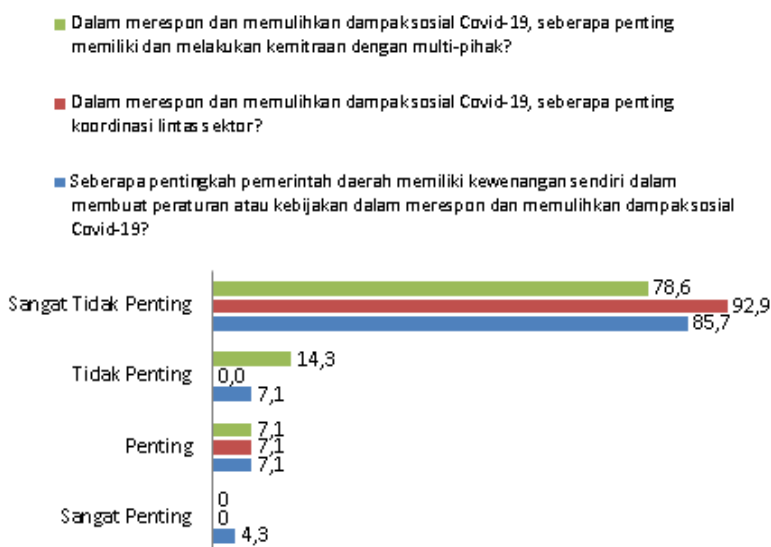
50% responden menilai bahwa stigmatisasi pada individu atau keluarga yang positif COVID-19, disusul dampak signifikan pada peningkatan kriminalitas karena dampak ekonomi COVID-19 yaitu sebesar 21,4%. beban wanita dalam rumah tangga juga dinilai akan meningkat karena tingginya interaksi dalam rumah dalam sebuah keluarga (21,4%). Pengetatan interaksi dan mobilitas masyarakat juga dinilai akan memberikan efek penyakit depresi, mental dan gangguan kecemasan pada masyarakat (21,4%).

Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



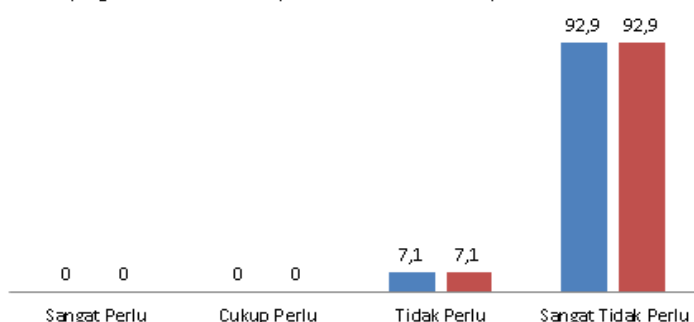
Perhatian terhadap kebutuhan lansia dinilai tidak akan terlalu terdampak dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat adat juga dinilai tidak terdampak. Meskipun terjadi pembatasan interaksi, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang biasa saja karena kesenjangan telah terjadi sebelum terjadinya COVID-19.

Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



Pemerintah Gorontalo menilai tidak penting untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dan membangun kemitraan. Dan tidak penting juga untuk memiliki kewenangan sendiri menghadapi pandemi. Responden menilai pandemi COVID-19 cukup diserahkan kepada pemerintah pusat karena sifat virus yang masih baru dan belum terdeskripsi secara detail. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 50% responden yang menyatakan, untuk menghadapi pandemi, kebijakan daerah sangat tidak cukup untuk merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19.

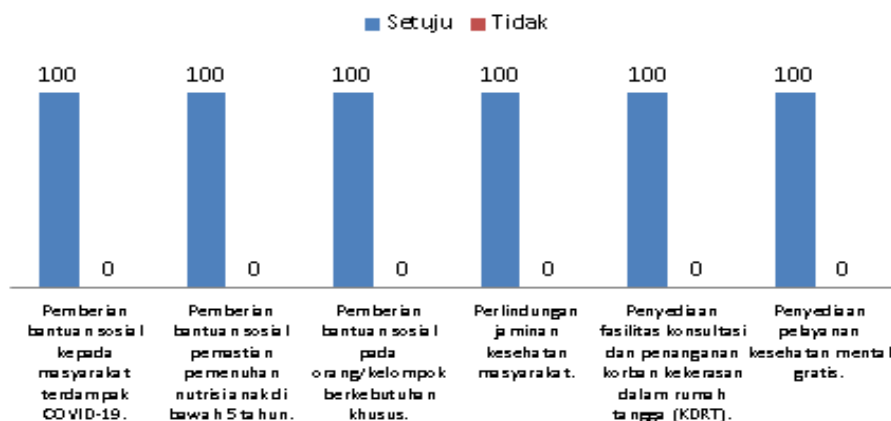
- Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang inovatif dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19 yang berfokus pada manusia (people-centred)?
- Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang inklusif dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19?



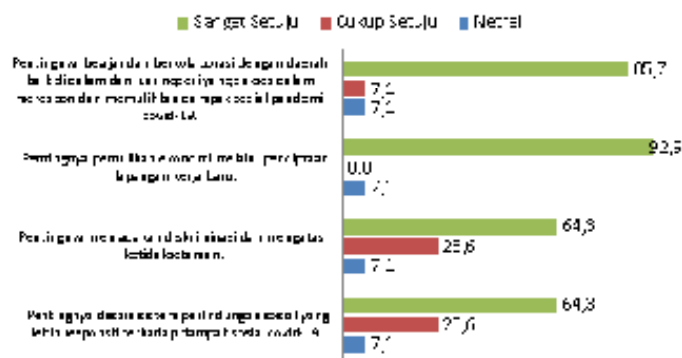
Responden menyatakan pemerintah daerah tidak perlu melakukan inovasi kebijakan dan memiliki kebijakan yang inklusif. Kebijakan harus berasal dari pemerintah pusat dan setiap daerah harus mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Secara umum, responden setuju terhadap program-program yang spesifik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan ditujukan kepada masyarakat. Pandemi dapat memunculkan peluang beredarnya berita hoax di masyarakat khususnya tentang keberadaan dan penanganan COVID-19.

Apakah Anda setuju bahwa program-program di bawah ini penting dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?

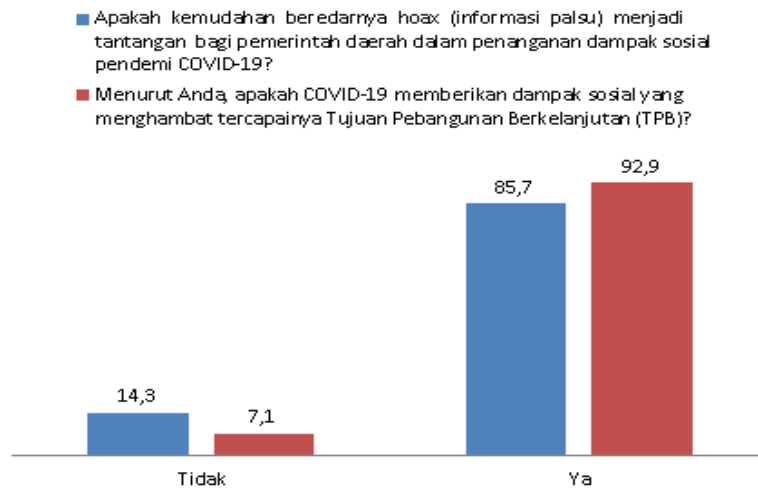


Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik dibawah ini?

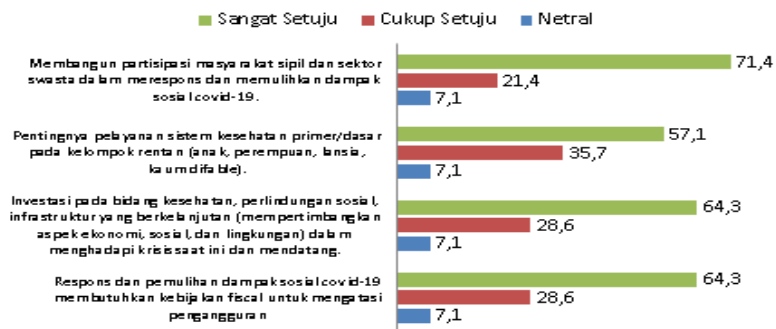


Sebanyak 85,7% responden menilai pemerintah harus mencontoh dan berkolaborasi dengan negara lain yang sukses menurunkan efek negatif pandemi COVID-19. Sebanyak 92,9% menilai pemerintah Kota Gorontalo perlu menciptakan lapangan kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi untuk memulihkan perekonomian.

Hoax (informasi palsu) masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial COVID-19. Tetapi, ketika dikaitkan dengan tantangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 92,9 % Responden sangat setuju bahwa COVID-19 menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

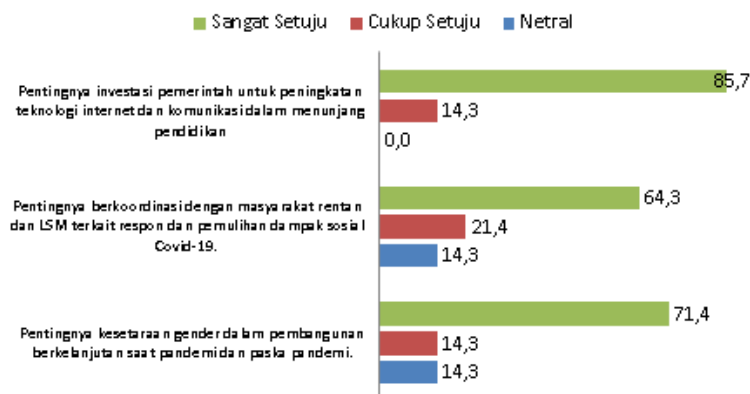


Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah ini?



71,4% responden di Kota Gorontalo sangat setuju untuk membangun partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19

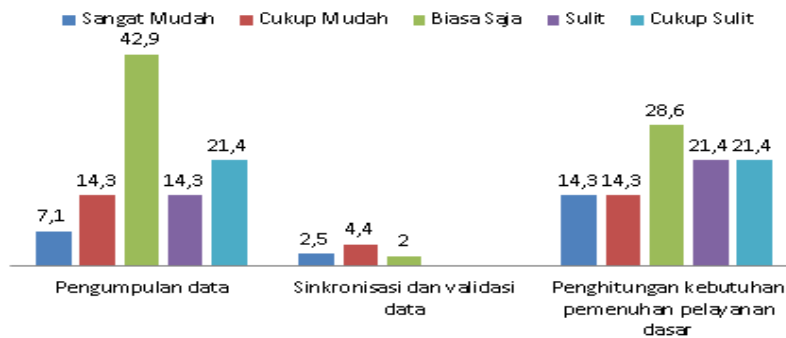
Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah ini?



Isu pendidikan sangat penting dimasa pandemi dan era normal baru.

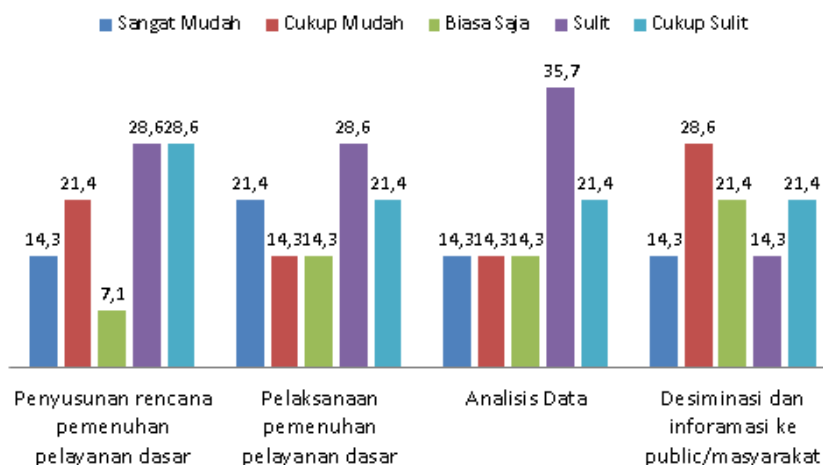
85,7% responden di kota Gorontalo setuju tentang pentingnya investasi pemerintah untuk peningkatan teknologi internet dan komunikasi dalam menunjang pendidikan

Seberapa sulitkah menurut anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



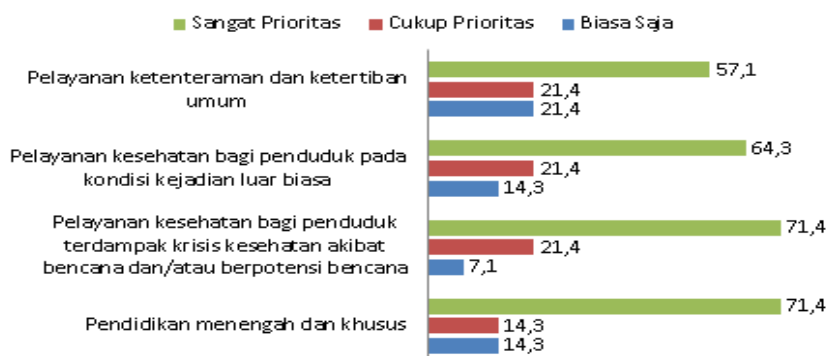
Pemerintah kota tetap melakukan atau fokus pada standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru. Tetapi, pengumpulan data SPM menjadi kendala meskipun tidak signifikan.

Seberapa sulitkah menurut anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



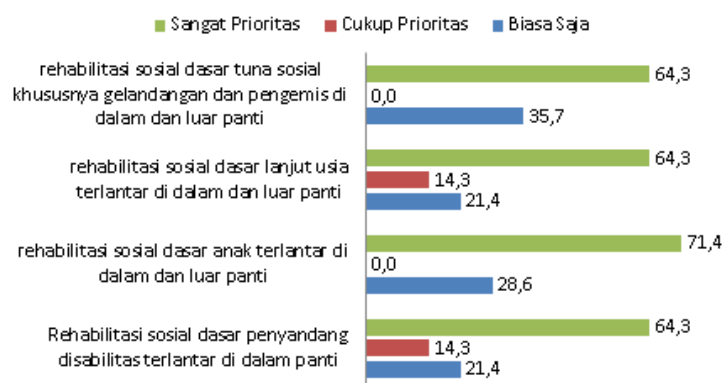
Badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Gorontalo mengakui bahwa dalam menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru, tantangan yang mereka hadapi adalah sulitnya penyusunan, pelaksanaan, analisis data.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini didaerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



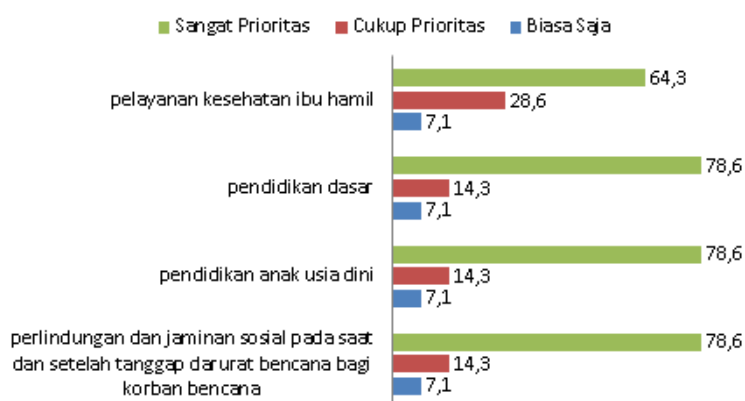
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama standar pelayanan minimal di kota Gorontalo yaitu sarana kesehatan sebesar 71,4 % dan 71,4% untuk penduduk.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



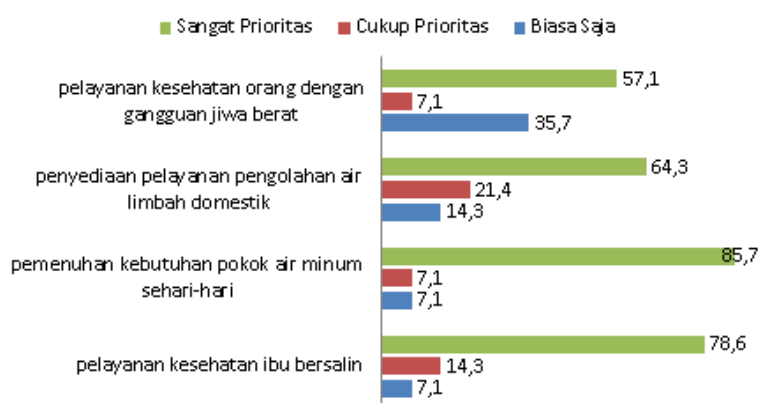
Dalam aspek sosial rehabilitasi, sosial desa atau anak terlanter di dalam dan di luar panti, menjadi perhatian utama. Kelompok ini dianggap paling rentan di masa pandemi COVID-19.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



Meskipun pendidikan menjadi prioritas utama, sektor lain yaitu penanggulangan bencana juga menjadi prioritas utama di pemerintah kota Gorontalo.

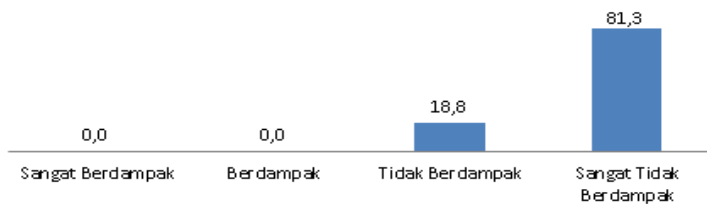
Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini didaerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



Kebutuhan pokok berupa air minum sehari-hari menjadi prioritas utama di masa pandemi ini, selain pelayanan kesehatan dan persalinan untuk ibu hamil.

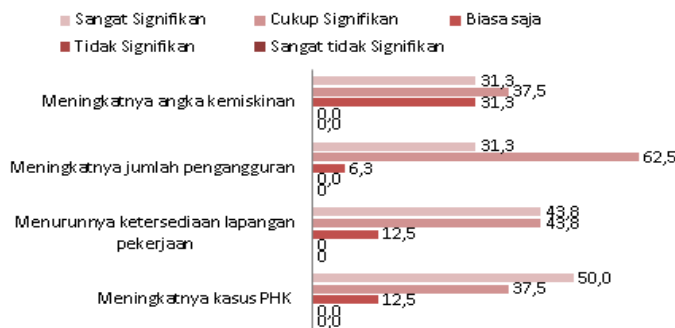
1.2 Kota Mataram

Sejauh mana COVID-19 berdampak terhadap aspek sosial saat ini?



81,3% responden di Mataram menilai pandemi sangat tidak berdampak terhadap aspek sosial.

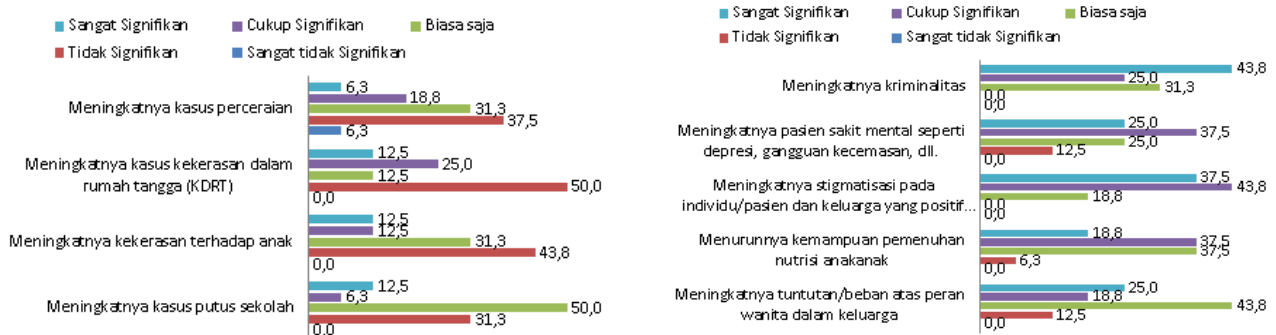
Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



68,8% responden menilai pandemi mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan di Kota Mataram. Hal tersebut dinilai berasal dari tingginya angka pengangguran dan penurunan lapangan kerja di Kota Mataram.

Responden juga menilai hal tersebut dikarenakan tingginya angka PHK di Kota Mataram.

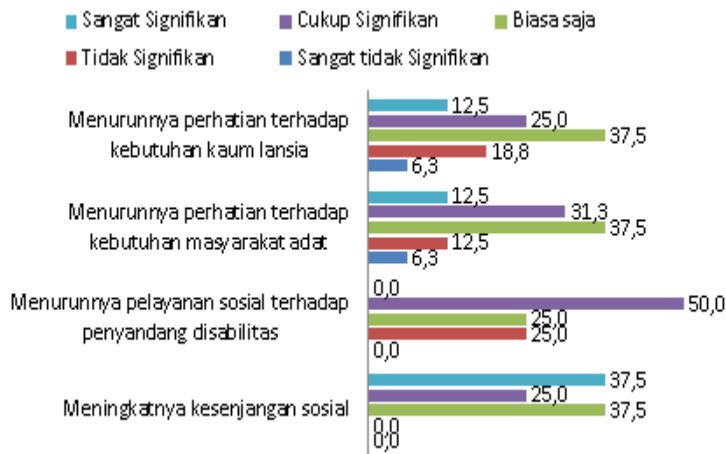
Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



Tingginya dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi diprediksi akan mempengaruhi tingginya angka kriminalitas. Sebanyak 68,8% responden di kota Mataram menyatakan COVID-19 berpengaruh signifikan kepada kriminalitas.

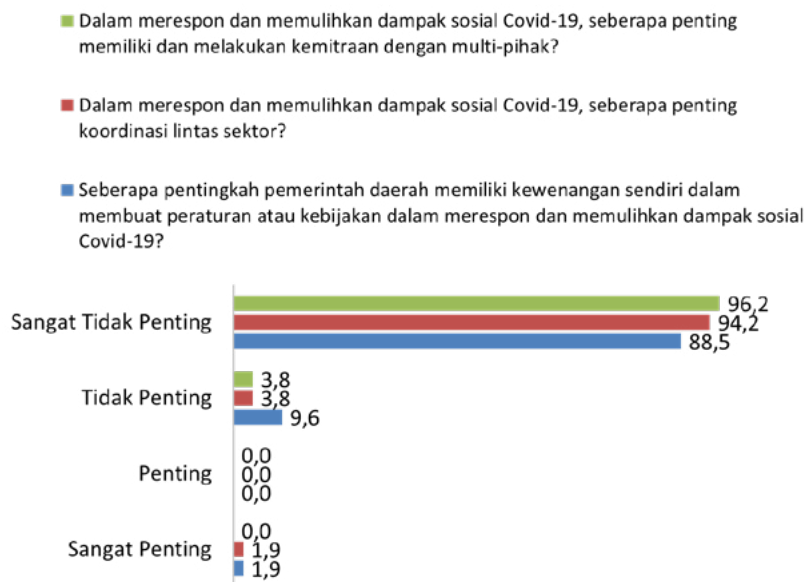
Dampak signifikan pada peningkatan kriminalitas karena dampak sosial COVID-19 sebesar 43,8%, beban wanita dalam rumah tangga juga dinilai meningkat dikarenakan interaksi yang meningkat dalam sebuah keluarga sebesar 25%. Pengetatan interaksi dan mobilitas masyarakat juga dinilai memberikan efek depresi, mental, dan gangguan kecemasan pada masyarakat (25%). Stigmatisasi pada individu/pasien dan keluarga yang positif COVID-19 juga terjadi (37,5%).

Beberapa Dampak Sosial Pandemi COVID-19



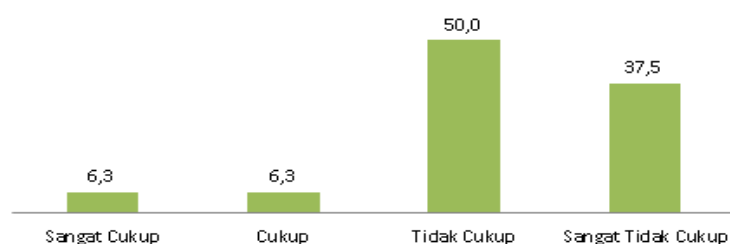
Kondisi minimnya interaksi dinilai akan menurunkan pelayanan terhadap lansia, dan penyandang disabilitas.

Kesenjangan sosial juga dinilai akan signifikan terpengaruh karena tertutupnya mobilitas masyarakat dan kurangnya interaksi sosial.



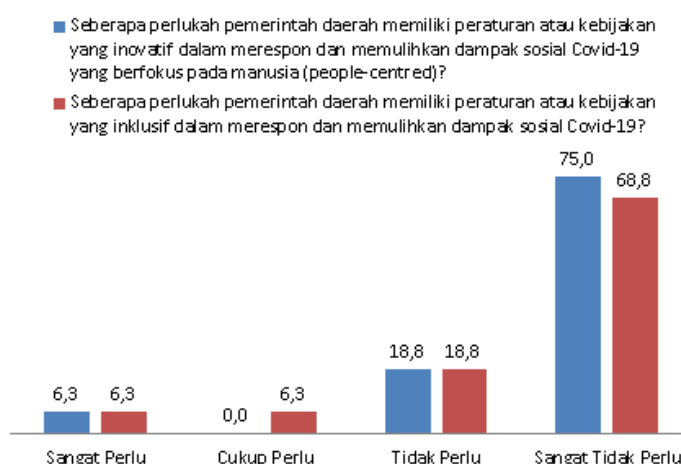
Responden menilai tidak penting untuk melakukan kemitraan dengan multi pihak. Responden menilai mereka seharusnya mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pusat. Koordinasi lintas sektor juga tidak penting untuk dilakukan responden karena status pandemi.

Seberapa cukupkah peraturan atau kebijakan di daerah anda dalam merespon dan memulihkan dampak sosial COVID-19?

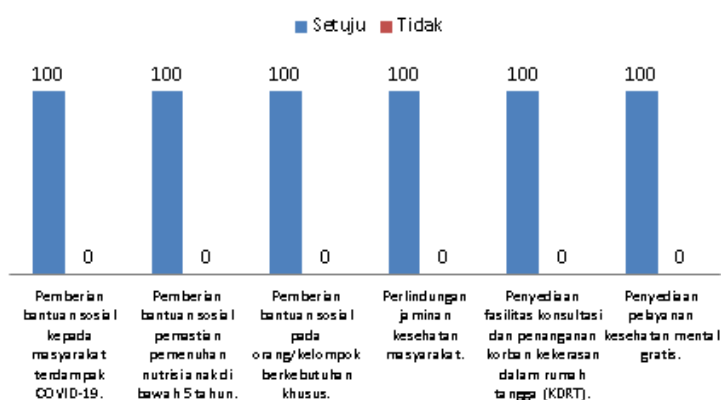


Dengan terbatasnya ruang gerak dinas-dinas di kota Mataram, responden menilai kebijakan pemerintah daerah tidak cukup untuk merespon pandemi.

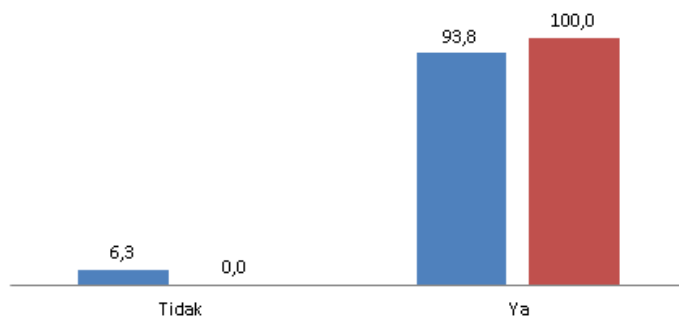
Responden juga menilai pemerintah tidak perlu melakukan kebijakan yang inklusif dan melakukan inovasi kebijakan dalam menghadapi pandemi.



Apakah Anda setuju bahwa program-program di bawah ini penting dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?



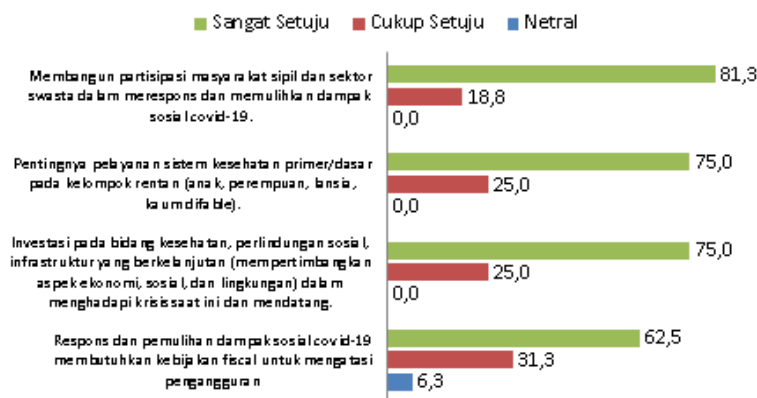
- Apakah kemudahan beredarnya *hoax* (informasi palsu) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?
- Menurut Anda, apakah COVID-19 memberikan dampak sosial yang menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?



Secara umum, responden setuju dengan program-program yang spesifik dilakukan pemerintah pusat dan ditujukan kepada masyarakat.

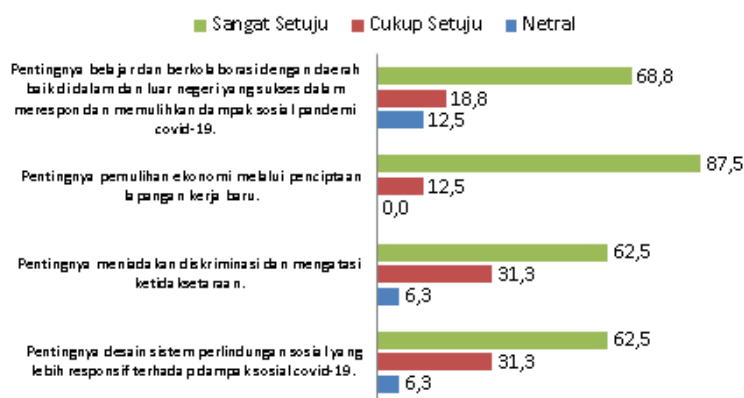
Responden juga setuju bahwa situasi yang memburuk akibat pandemi juga akan memperburuk tingkat *hoax* dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sedang berjalan.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



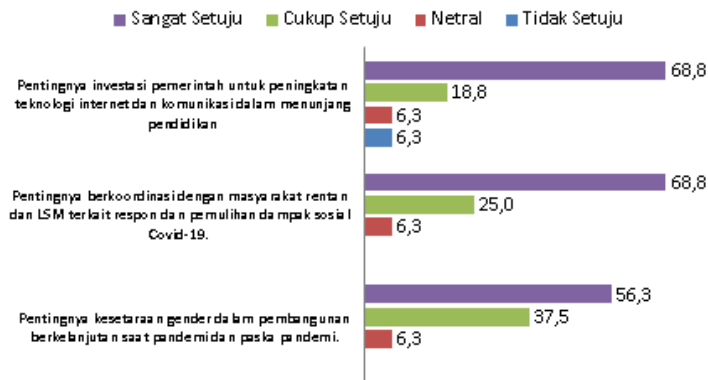
81,3% masyarakat kota Mataram setuju dengan dibangunnya partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



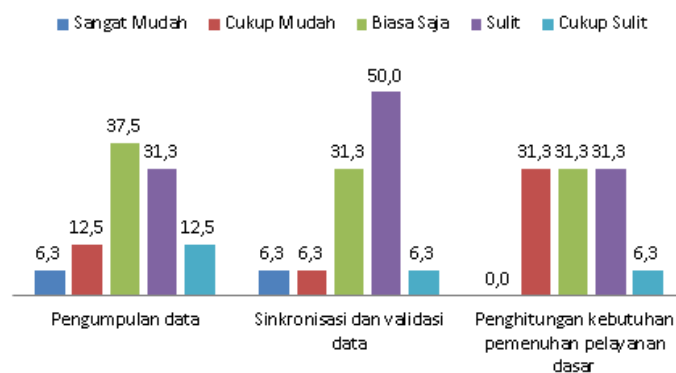
68,8% responden berpendapat bahwa pemerintah harus mencontoh dan berkolaborasi dengan negara lain yang berhasil menurunkan efek negatif COVID-19. Selain itu 87,5% responden juga berpendapat bahwa penting bagi Pemerintah Kota Mataram untuk memulihkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja baru yang sesuai dengan situasi pandemi.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



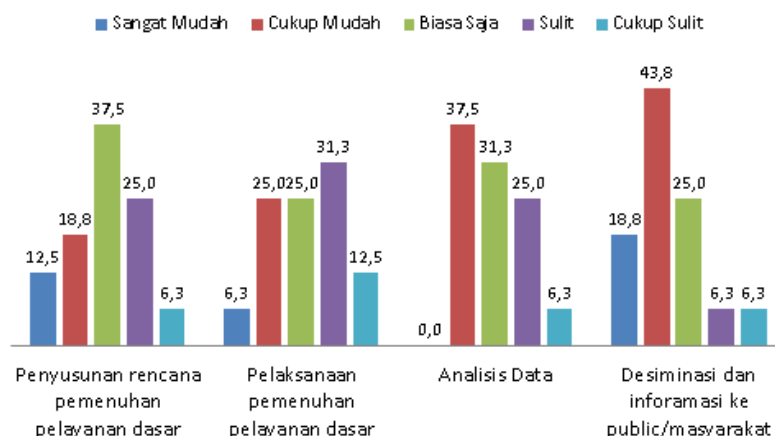
Di masa pandemi ini, isu pendidikan masih dianggap sebagai sebuah isu yang penting. 68,8% responden sangat setuju apabila investasi pemerintah banyak dilakukan untuk peningkatan teknologi internet dan komunikasi dalam menunjang pendidikan.

Seberapa sulitkah menurut anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



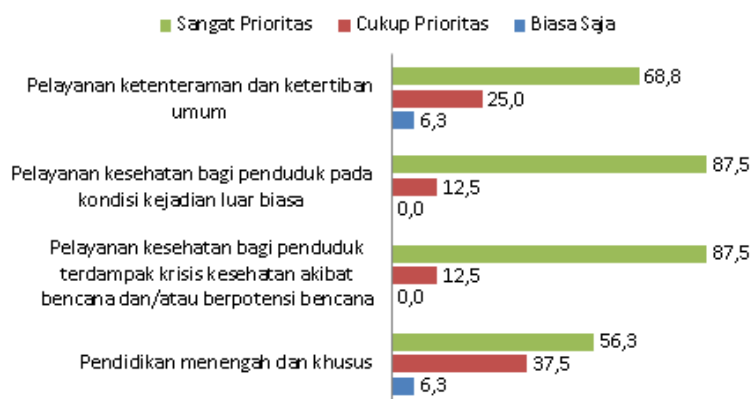
Kondisi pandemi juga berpengaruh terhadap kinerja responden di instansinya. Sebesar 43,8% responden mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data dan validasi data.

Seberapa sulitkah menurut anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



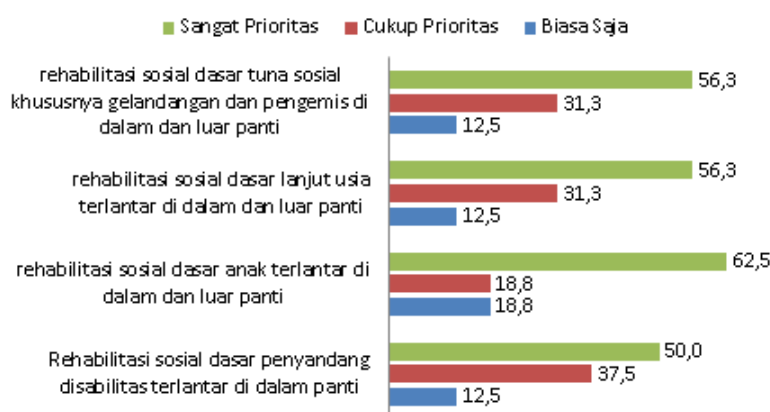
Badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram mengakui bahwa dalam menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru, tantangan yang mereka hadapi adalah sulitnya penyusunan, pelaksanaan, analisis data.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



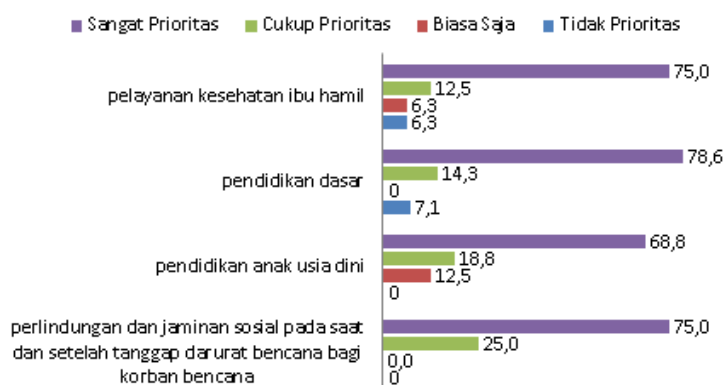
Sektor pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana (87,5%) dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (87,5%) menjadi sektor yang dinilai lebih penting saat ini.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



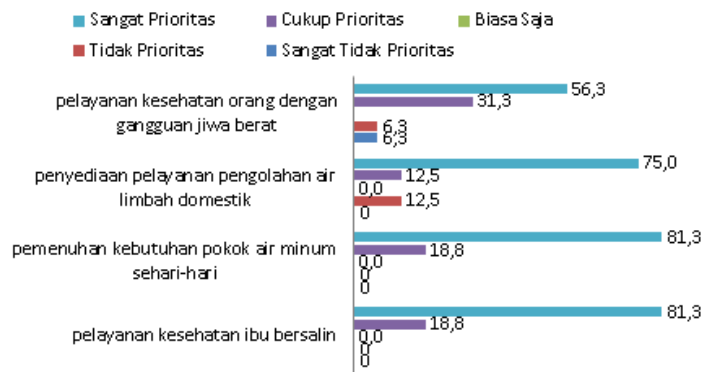
Dalam aspek sosial rehabilitasi, sosial desa atau anak terlanter di dalam dan di luar panti, menjadi perhatian utama. Kelompok ini dianggap paling rentan di masa pandemi COVID-19.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



Di Kota Mataram, sektor pendidikan dasar masih menjadi sektor prioritas utama (78,6%).

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?

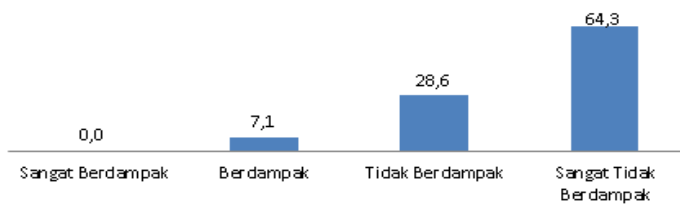


Prioritas utama di kota Mataram saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (81,3%) dan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (81,3%).



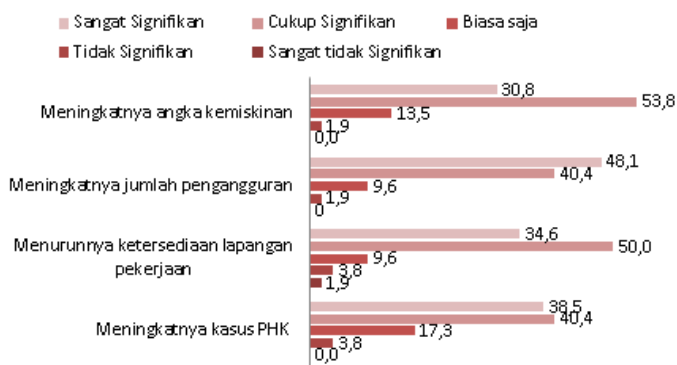
1.3 Provinsi DKI Jakarta

Sejauh mana COVID-19 berdampak terhadap aspek sosial saat ini?



Mayoritas (64,3%) responden menilai COVID-19 tidak memberikan dampak sosial di DKI Jakarta. Hanya sebesar 7,1% responden menilai bahwa COVID-19 memberikan dampak sosial.

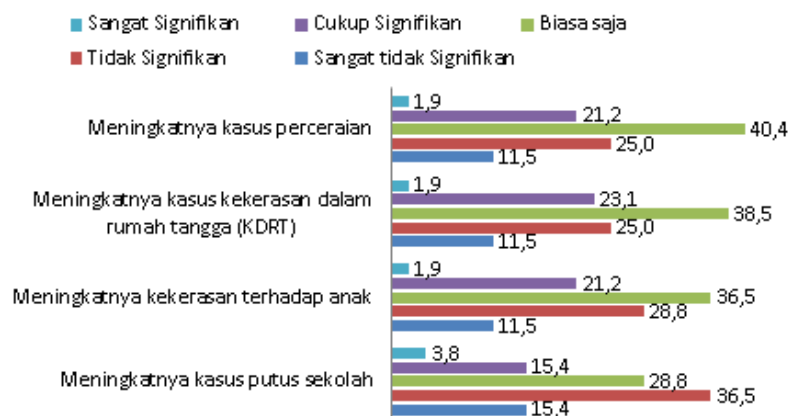
Dampak-dampak Sosial Pandemi COVID-19



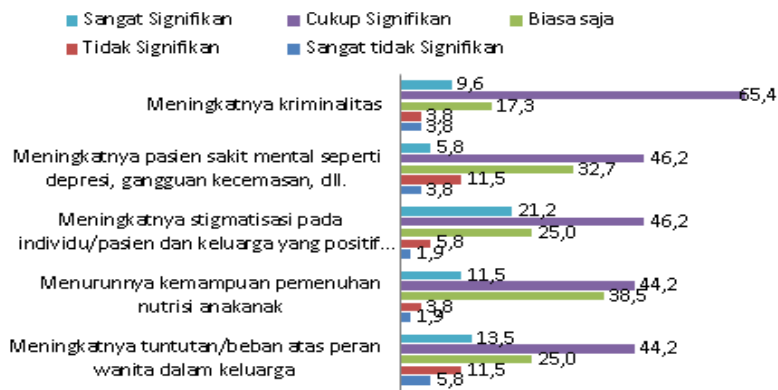
30,8% responden menganggap pandemi COVID-19 memberikan efek buruk terhadap peningkatan angka kemiskinan. Pandemi COVID-19 berakibat pada peningkatan angka pengangguran, penurunan lapangan kerja dan tingginya angka PHK di Provinsi DKI Jakarta.

Responden tidak melihat adanya dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus perceraian, KDRT, kekerasan terhadap anak, dan kasus putus sekolah.

Dampak-dampak Sosial Pandemi COVID-19

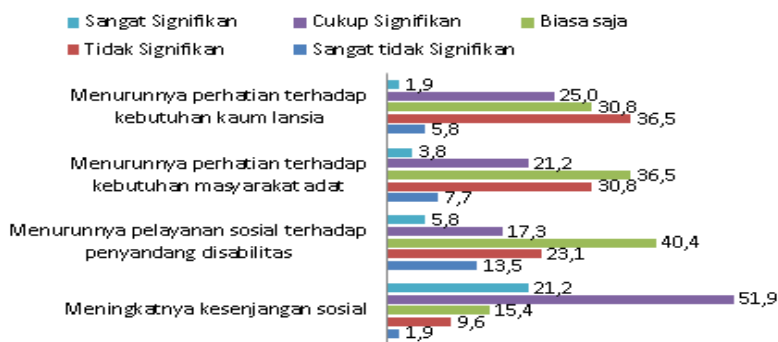


Dampak-dampak Sosial Pandemi COVID-19



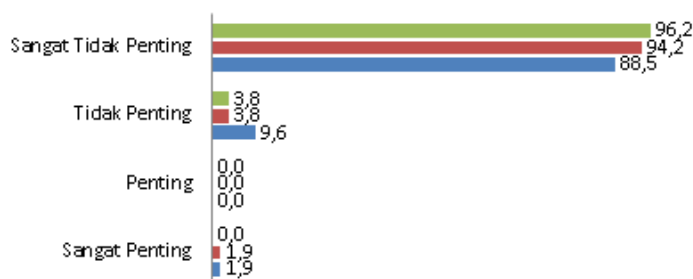
21.2% responden menilai terdapat dampak yang sangat signifikan adanya stigmatisasi pada individu atau keluarga yang positif COVID-19, disusul dampak signifikan pada beban wanita dalam rumah tangga (13,5%) yang meningkat karena *work from home* (WFH) dan pengetatan interaksi dan mobilitas masyarakat.

Dampak-dampak Sosial Pandemi COVID-19



Responden menilai bahwa terjadi peningkatan kesenjangan sosial sebagai imbas dari meningkatnya PHK dan angka pengangguran terbuka.

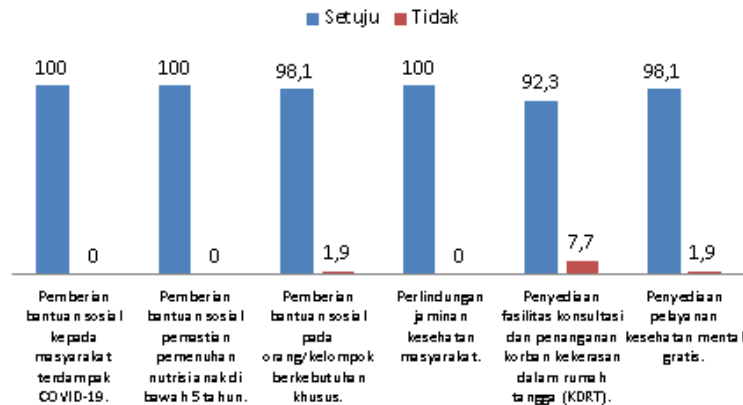
- Dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19, seberapa penting memiliki dan melakukan kemitraan dengan multi-pihak?
- Dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19, seberapa penting koordinasi lintas sektor?
- Seberapa pentingkah pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam membuat peraturan atau kebijakan dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19?



Responden menilai tidak penting untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dan membangun kemitraan karena responden beranggapan bahwa dampak sosial dari COVID-19 tidak signifikan. Dan tidak penting juga untuk memiliki kewenangan sendiri menghadapi pandemi COVID-19 dalam aspek sosial. Responden menilai kebijakan penanganan pandemi COVID-19 lebih diserahkan kepada pemerintah pusat.

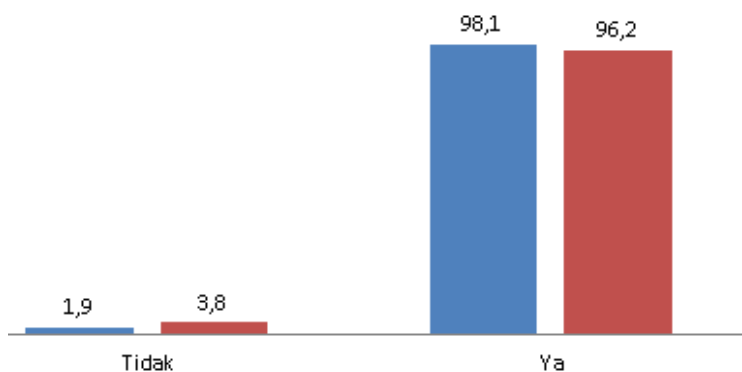
Responden menyatakan pemerintah daerah tidak perlu melakukan inovasi kebijakan dan memiliki kebijakan yang inklusif khususnya pada penanganan dampak sosial COVID-19. Kebijakan harus berasal dari pemerintah pusat dan setiap daerah harus mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Apakah Anda setuju bahwa program-program di bawah ini penting dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?



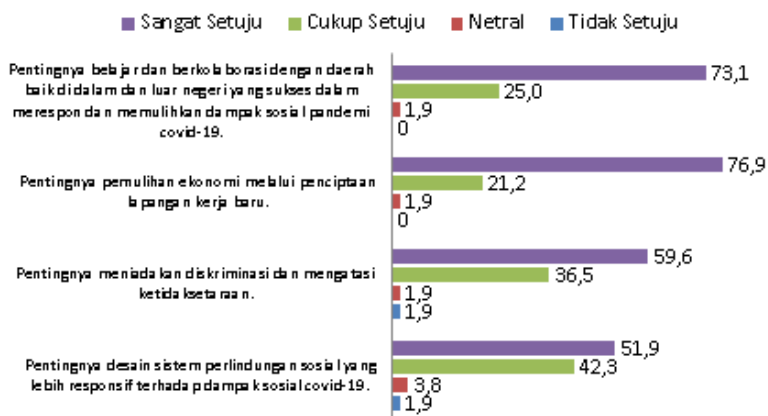
Secara umum, responden setuju terhadap program-program yang spesifik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan ditujukan kepada masyarakat.

- Apakah kemudahan beredarnya hoax (informasi palsu) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?
- Menurut Anda, apakah COVID-19 memberikan dampak sosial yang menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?



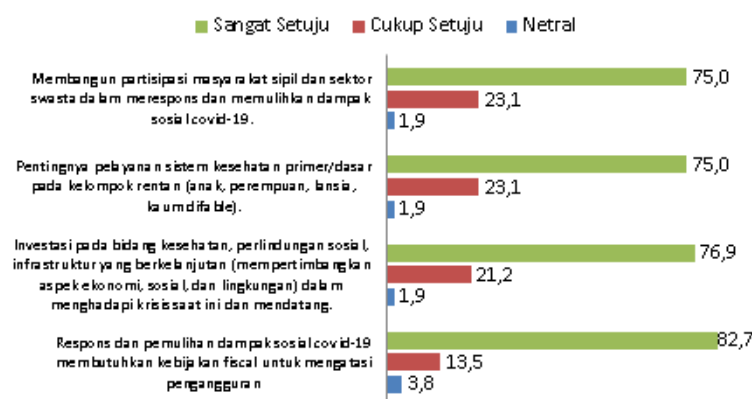
Responden juga beranggapan bahwa kondisi pandemi akan memperburuk tingkat *hoax* dan akan menghambat pembangunan berkelanjutan yang tengah dilakukan.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



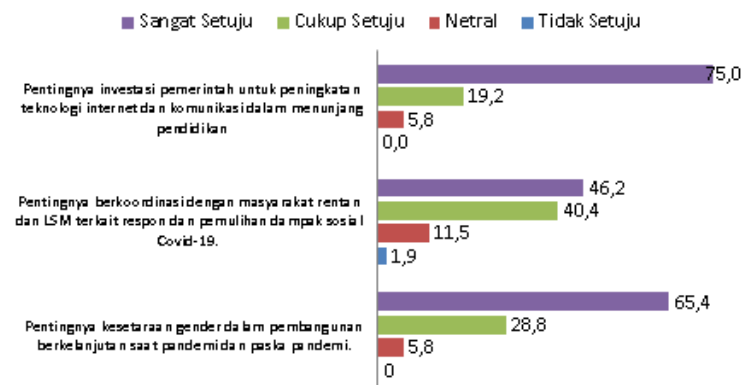
Sebanyak 73,1% responden menilai pemerintah harus mencontoh dan berkolaborasi dengan negara lain yang sukses menurunkan efek negatif pandemi COVID-19. Ditambah lagi, 76,9% menilai pemerintah provinsi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk memulihkan perekonomian.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



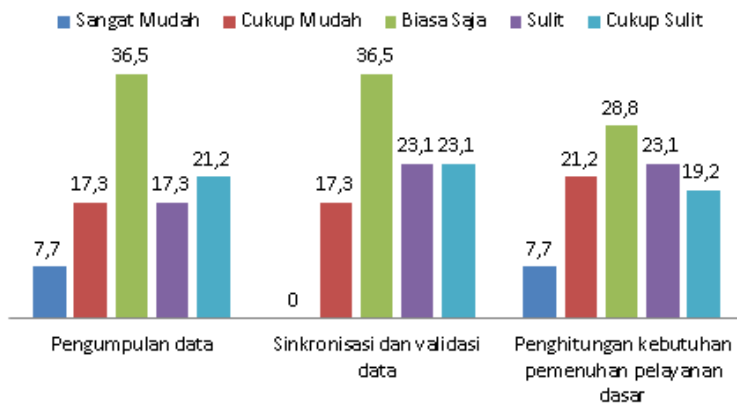
Responden beranggapan bahwa dalam pemulihan dampak sosial COVID-19 membutuhkan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran (82,7%), dan responden juga beranggapan bahwa saat ini perlu ada investasi pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur yang berkelanjutan untuk menghadapi krisis saat ini dan krisis mendatang.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



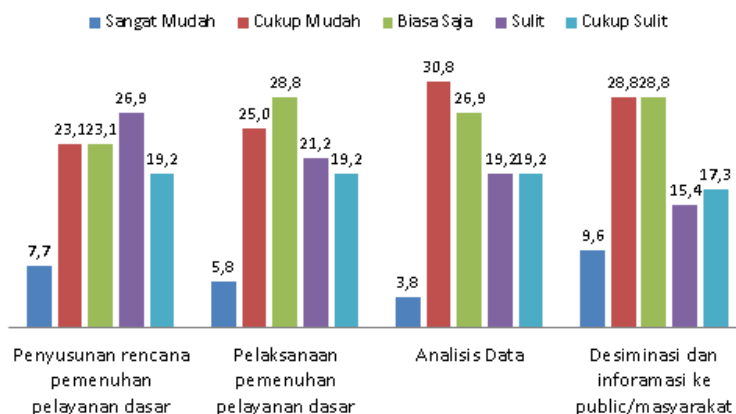
75% responden setuju bahwa penting bagi pemerintah untuk berinvestasi yang bertujuan untuk meningkatkan teknologi internet dan komunikasi untuk menunjang pendidikan, selain itu responden juga beranggapan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan saat pandemi itu penting (65,4%)

Seberapa sulitkah menurut Anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?"



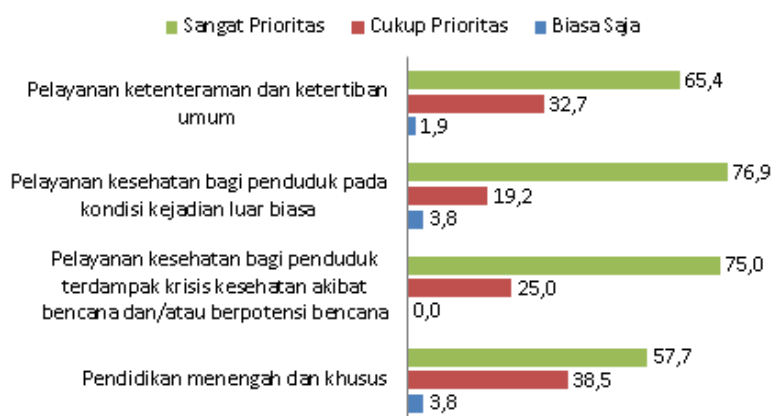
Saat pandemi, pemerintah kota tetap berfokus pada standar pelayanan minimal. Namun saat ini bagi Organisasi Perangkat Daerah, tantangan baru yang dihadapi oleh para aparatur saat ini adalah pengumpulan data, sinkronisasi data, walaupun tidak signifikan.

Seberapa sulitkah menurut Anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?"



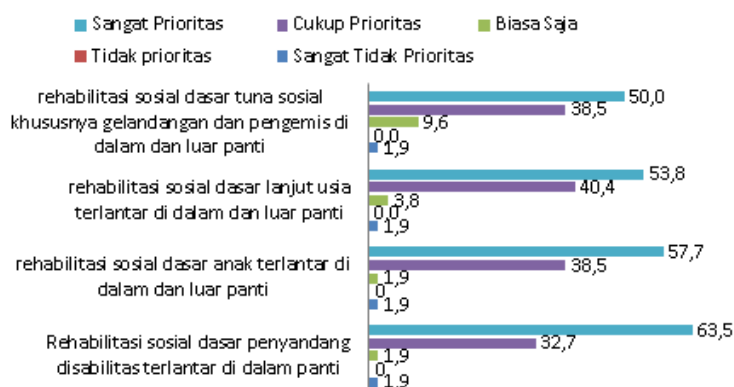
Pemerintah saat ini memiliki tantangan baru mengenai analisis data yang diperoleh serta diseminasi informasi kepada masyarakat.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?"



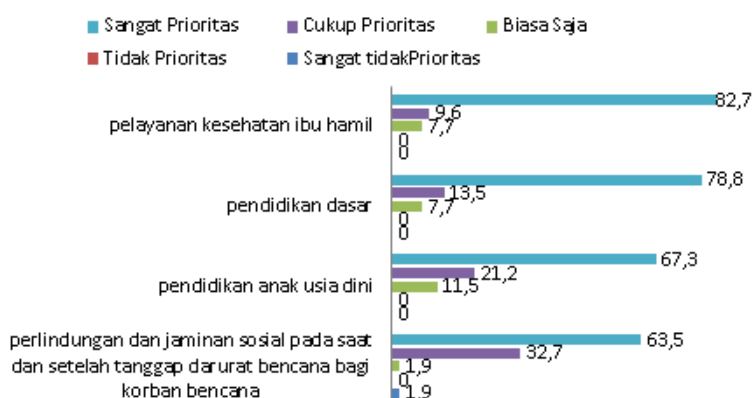
Prioritas yang diungkapkan responden saat ini adalah pelayanan yang diprioritaskan bagi penduduk dengan kondisi kejadian luar biasa (76,9%) dan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana (75%).

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



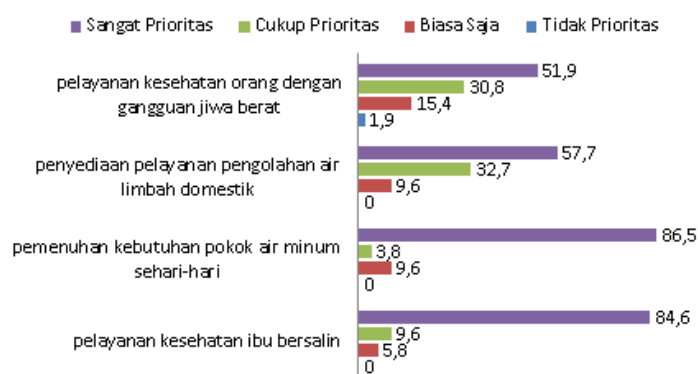
Di DKI Jakarta, kelompok yang saat ini dianggap paling rentan saat pandemi adalah kelompok disabilitas terlantar di dalam panti (63,5%) dan kelompok anak terlantar baik di luar maupun di dalam panti (57,7%)

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?"



Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang sedang diprioritaskan di DKI Jakarta, pada kategori ini, responden beranggapan bahwa pelayanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk sektor yang paling penting (82,7%) dan sektor pendidikan dasar sebesar 78,8%.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?"



Kebutuhan terbesar ada di sektor kesehatan, yaitu kebutuhan pemenuhan air minum (86,6%) dan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin sebesar 84,6%.

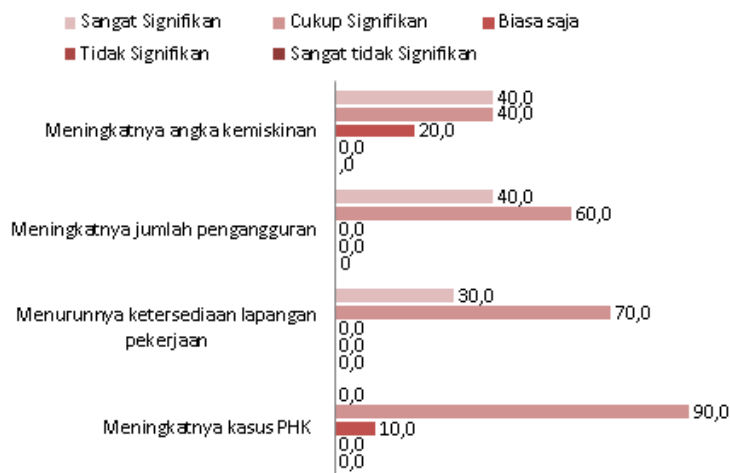
1.4 Provinsi Lampung

Sejauh mana COVID-19 berdampak terhadap aspek sosial saat ini?



Seluruh responden di Provinsi Lampung menilai COVID-19 tidak memberikan dampak sosial.

Dampak-dampak Ekonomi Pandemi COVID-19



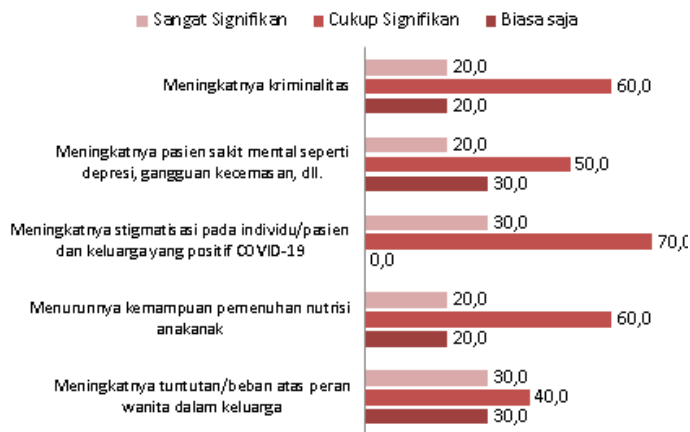
Responden tegas menilai bahwa pandemi COVID-19 memberikan efek negatif terhadap perekonomian. 80% responden menilai pandemi menciptakan tingginya angka kemiskinan, jumlah pengangguran, ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya kasus PHK.

Dampak-Dampak Sosial Pandemi COVID-19



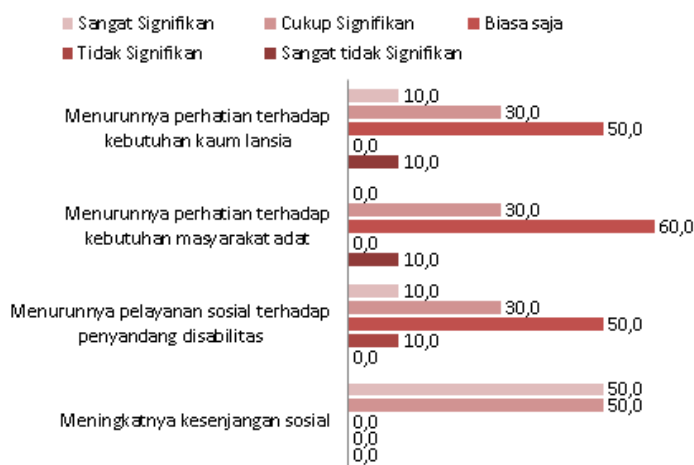
Responden menilai terjadi kenaikan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial

Dampak-Dampak Sosial Pandemi COVID-19



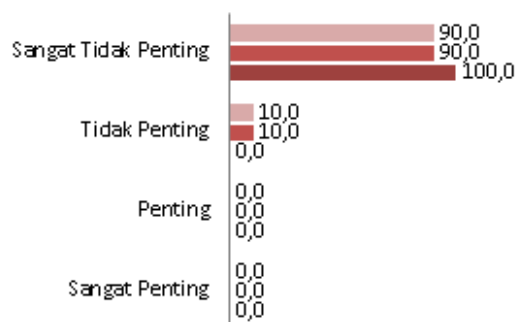
80% responden menilai angka kriminalitas akan meningkat, dan 70% responden menilai gangguan penyakit depresi dan mental akan meningkat.

Dampak-Dampak Sosial Pandemi COVID-19



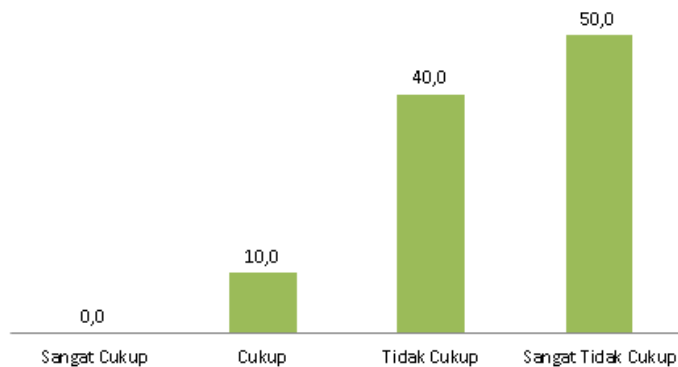
COVID-19 tidak memberi dampak yang signifikan dalam perhatian terhadap kaum lansia, masyarakat adat, maupun penyandang disabilitas. Namun responden dengan tegas menyetujui bahwa terjadi kesenjangan sosial yang disebabkan COVID-19 (50%).

- Dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19, seberapa penting memiliki dan melakukan kemitraan dengan multi-pihak?
- Dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19, seberapa penting koordinasi lintas sektor?
- Seberapa pentingkah pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam membuat peraturan atau kebijakan dalam merespon dan memulihkan dampak sosial Covid-19?



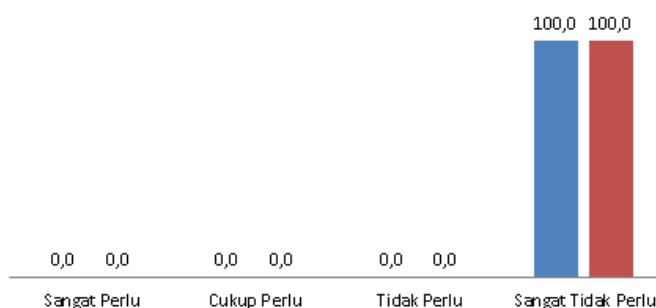
Responden menilai untuk saat ini, mereka tidak memprioritaskan kemitraan dan melakukan koordinasi lintas sektor. Responden menilai mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait COVID-19. Sehingga mereka mendesak pemerintah daerah untuk berkolaborasi langsung dengan pusat karena kebijakan pemerintah daerah saja dinilai tidak cukup dalam merespon pandemi COVID-19.

Seberapa cukupkah peraturan atau kebijakan di daerah anda dalam merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19?



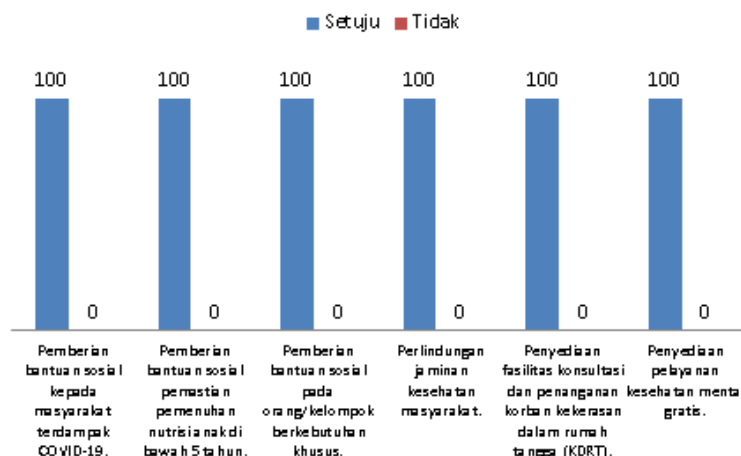
Responden menganggap bahwa peraturan yang dibuat di Lampung tidak cukup untuk merespons dan memulihkan dampak sosial COVID-19.

- Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang inovatif dalam merespons dan memulihkan dampak sosial Covid-19 yang berfokus pada manusia (people-centred)?
- Seberapa perlukah pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan yang inklusif dalam merespons dan memulihkan dampak sosial Covid-19?



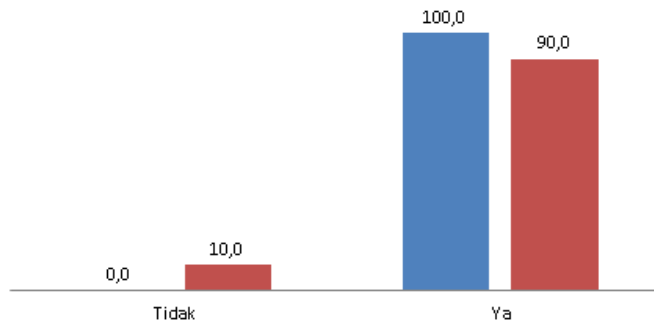
Responden beranggapan bahwa tidak perlu ada peraturan yang inovatif serta inklusif sebagai bentuk respons pemulihan dampak sosial COVID-19.

Apakah Anda setuju bahwa program-program di bawah ini penting dalam usaha penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?

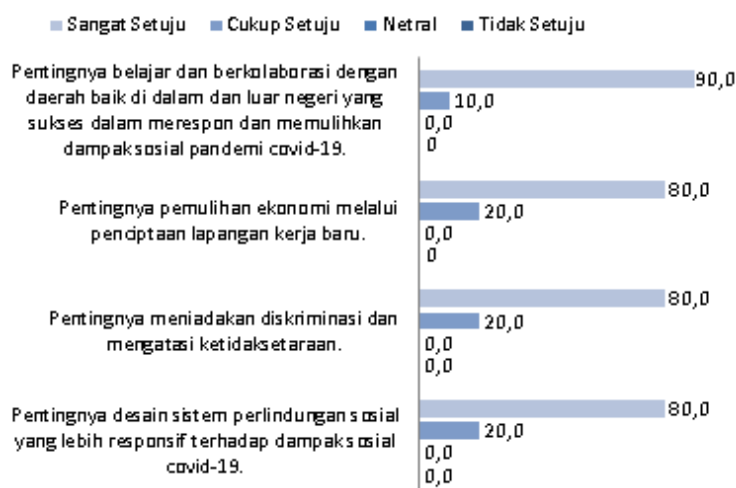


Responden setuju dengan segala program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menganggap penting program-program ini untuk membantu menangani dampak sosial pandemi.

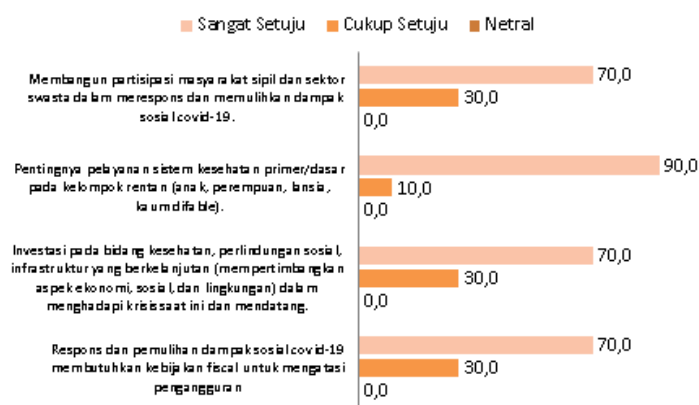
- Apakah kemudahan beredarnya hoax (informasi palsu) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial pandemi COVID-19?
- Menurut Anda, apakah COVID-19 memberikan dampak sosial yang menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)?



Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah

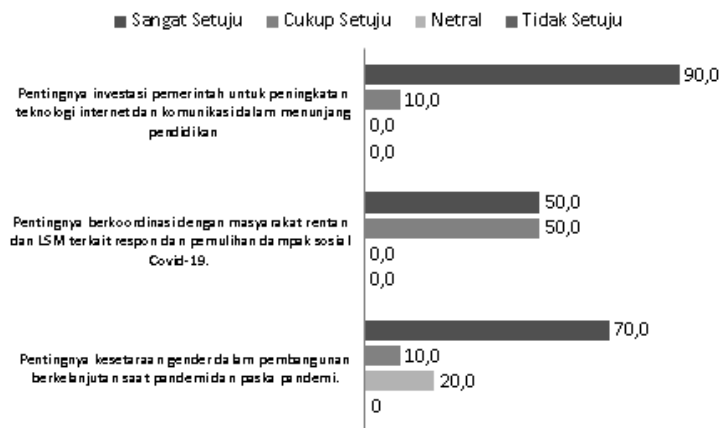


Hoax (informasi palsu) masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial COVID-19. Tetapi, ketika dikaitkan dengan tantangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Hampir seluruh responden sangat setuju bahwa COVID-19 menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

90% responden setuju bahwa penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan daerah manapun yang berhasil memulihkan dampak sosial COVID-19, dan responden setuju mengenai pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru; meniadakan diskriminasi serta perlindungan sosial yang lebih responsif (80%).

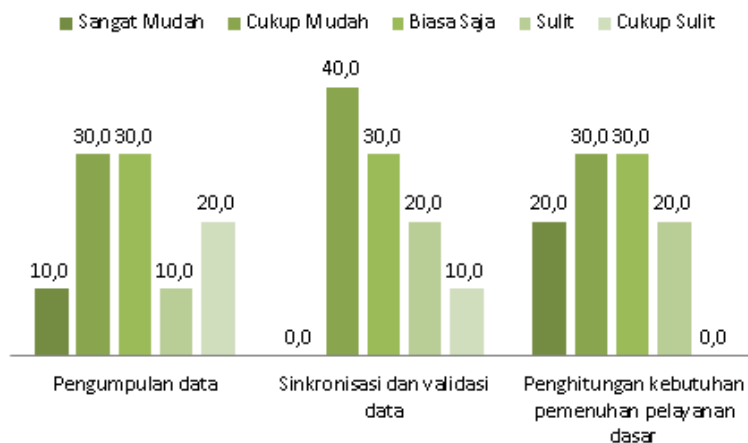
Responden menilai bahwa perlunya ada partisipasi dari masyarakat sipil dalam merespons pandemi COVID-19. dan perlunya pemerintah daerah untuk berinvestasi di bidang alat kesehatan terutama bagi kelompok yang dinilai rentan.

Seberapa setuju Anda dengan gagasan-gagasan dalam membangun lebih baik di bawah



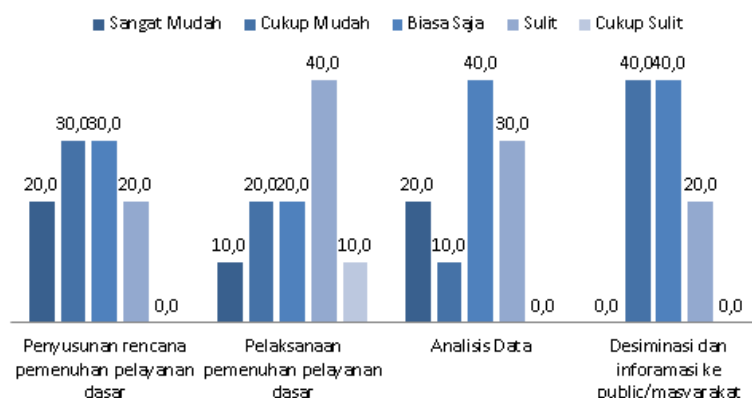
90% responden setuju dengan investasi pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan teknologi, internet, komunikasi dalam menunjang pendidikan.

Seberapa sulitkah menurut Anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



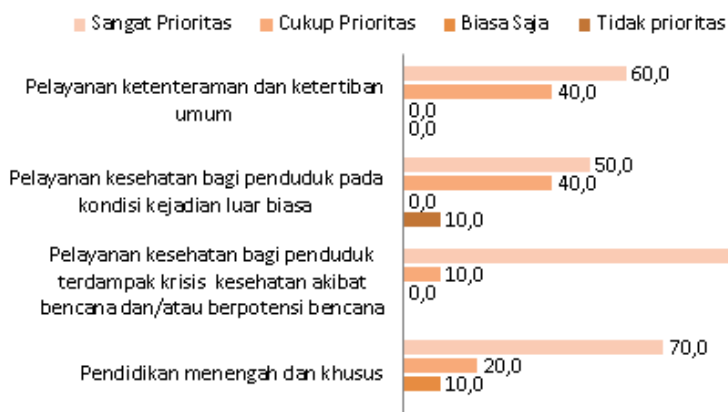
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung mengakui bahwa dalam menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru, tantangan yang mereka hadapi adalah sulitnya penyusunan, pelaksanaan, analisis data.

Seberapa sulitkah menurut Anda untuk menerapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



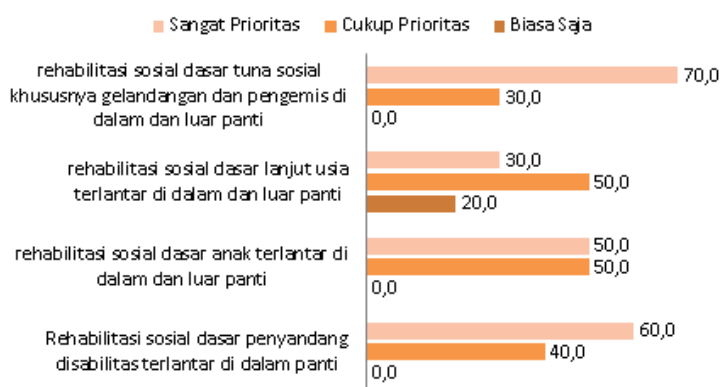
Pemerintah menemukan tantangan baru dalam penerapan standar pelayanan minimal di era pandemi, yaitu pelaksanaan pelayanan dasar, analisis data, serta diseminasi informasi ke masyarakat.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



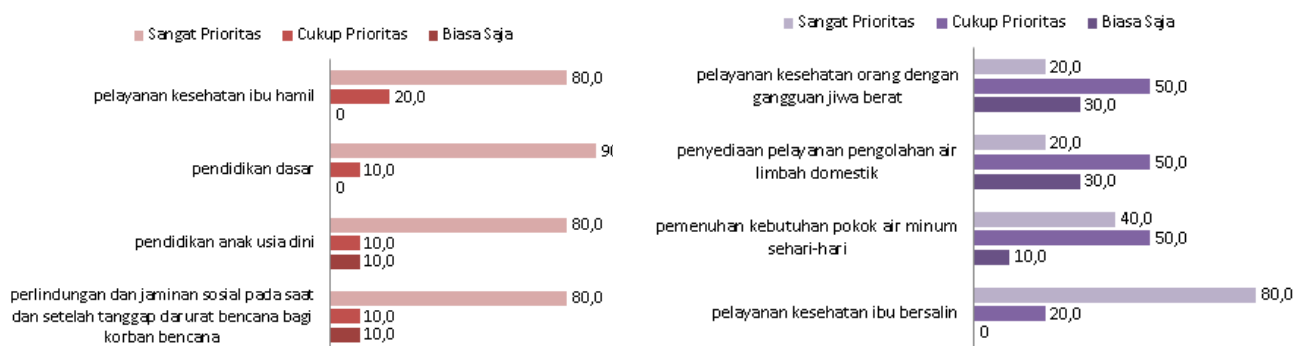
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan menempati prioritas utama bagi para responden (90%).

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



Responden beranggapan bahwa rehabilitasi dasar tuna sosial bagi gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti (70%) serta rehabilitasi sosial bagi disabilitas terlanter di dalam panti (60%) menempati prioritas utama.

Seberapa prioritaskah beberapa hal dibawah ini di daerah anda dalam menetapkan standar pelayanan minimal di era pandemi COVID-19 dan era normal baru?



Isu pendidikan masih menjadi isu terpenting di Lampung (90%), selain itu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, pendidikan anak usia dini, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana (80%).

UKM Keben Bali.
Lokasi : Desa Keliki, Tegalalang, Gianyar, Bali.
(Sumber: Bastian AS & Tim)



Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: secretariat@uclg-aspac.org

Situs : <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>



Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.